

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI**

**KOMUNIKASI PARTISIPATIF PADA MUSRENBANG
DI DESA KOTA BANGUN KECAMATAN TAPUNG HILIR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)
Pada Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Riau



**SRI INDAH WAHYUNI
NPM: 179110015**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Sri Indah Wahyuni
NPM : 179110015
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Konsentrasi : Media Massa
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Hari/Tanggal Seminar : 07 Juli 2021
Judul Penelitian : Komunikasi Partisipatif pada Musrenbang di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk disidangkan dalam ujian komprehensif.

Pekanbaru, 16 Juli 2021

Menyetujui,

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi

Pembimbing



(Eka Fitri Qurniawati, M.I.Kom)



(Dr. Fatmawati, S.IP., MM)

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Nama : Sri Indah Wahyuni
NPM : 179110015
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Kosentrasi : Media Massa
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Hari/ Tanggal Ujian : 07 Juli 2021
Judul Skripsi : Komunikasi Partisipatif pada Musrenbang di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir

Naskah ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu tim penguji ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Komunikasi dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

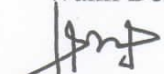
Pekanbaru, 16 Juli 2021

Tim Penguji,

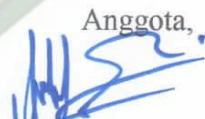
Ketua


(Dr. Fatmawati, S.IP., MM)

Mengetahui
Wakil Dekan I


(Cutra Aslinda, M.I.Kom)

Anggota,


(Al Sukri, M.I.Kom)

Anggota,

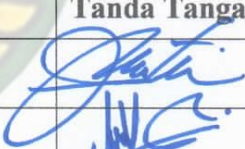
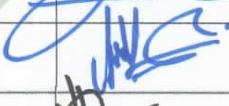
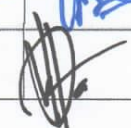

(Harry Setiawan, M.I.Kom)

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau Nomor : 0901/UIR-Fikom/Kpts/2021 Tanggal 30 Juni 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini rabu Tanggal 07 Juli 2021 Jam : 15.00 – 16.00 WIB bertempat di ruang seminar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau telah dilaksanakan Ujian Skripsi Mahasiswa atas :

Nama : Sri Indah Wahyuni
NPM : 179110015
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Kosentrasi : Media Massa
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : ” Komunikasi Partisipatif pada Musrenbang di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir ”
Nilai Ujian : Angka : “ 75,8 “ ; Huruf : ” B+ “
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Fatmawati, S.IP., MM	Ketua	
2.	Al Sukri, M.I.Kom	Penguji	
3.	Harry Setiawan, M.I.Kom	Penguji	

Pekanbaru, 16 Juli 2021

Dekan



Dr. Muhd. AR. Imam Riau, M.I.Kom

NPK : 150802514

HALAMAN PENGESAHAN

**Komunikasi Partisipatif pada Musrenbang
di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir**

Yang diajukan oleh :

Sri Indah Wahyuni

179110015

Pada tanggal :

16 Juli 2021

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi

(Dr. Muhd. AR. Imam Riauan, M.I.Kom)

Dewan Penguji,

Tanda Tangan,

Dt. Fatmawati, S.IP., MM

Al Sukri, M.I.Kom

Harry Setiawan, M.I.Kom

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Indah Wahyuni
Tempat / Tanggal Lahir : Lubuk Pakam/ 10 Oktober 1998
NPM : 179110015
Bidang Konsentrasi : Media Massa
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Fakultas : Ilmu Komunikasi
Alamat / No Tlp : Jl. Kaharudin Nasution / No Tlp: 082287112778
Judul Skripsi : Komunikasi Partisipatif pada Musrenbang
di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya (skripsi) adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Riau maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali pengarahan Tim Kondisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas di cantumkan sebagai acuan dalam daftar pustaka.
4. Bersedian untuk mempublikasikan karya tulis saya (Skripsi) di Jurnal Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau.
5. Pernyataan ini sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dari apa yang saya nyatakan di atas (poin 1-3), maka saya bersedia menerima sanksi pembatalan nilai skripsi dan atau pencabutan gelar akademik kesarjanaan saya dan sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Islam Riau.

Pekanbaru, Juni 2021

Yang Menyatakan



Sri Indah Wahyuni

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tersayang Bapak Tugino dan Mamak Fitri Aningsih sekaligus untuk adik tercinta Kiki Helmaliya Andrayani. Merekalah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap dimana skripsi ini selesai. Terima kasih atas pengorbanan, nasihat, dan doa yang telah diberikan.

Terima kasih kepada teman-teman sayang yang sering mengingatkan dan menanyakan kapan wisuda, sehingga saya termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan cepat. Penulis juga ingin berterima kasih pada BTS karena lagu-lagu mereka menjadi teman untuk mengerjakan tugas akhir ini.

Penulis berharap karya tulis ini dapat membuat Bapak, Mamak, dan keluarga besar bangga dan semoga perjuangan penulis dapat membuahkan hasil yang baik kedepannya dan semoga ilmu yang penulis terima dapat bermanfaat untuk orang banyak.

MOTTO

Usaha membentukmu. Kamu akan menyesal suatu hari nanti jika kamu tidak melakukan yang terbaik sekarang. Jangan berfikir ini terlambat, tetapi teruslah kerjakan. Itu membutuhkan waktu, tetapi tidak ada yang bertambah buruk karena berlatih. Jafi berlatihlah. Kamu mungkin mengalami depresi, tapi itu bukti bahwa kamu berbuat baik.

Jungkook

Sukses adalah guru yang buruk. Sukses menggoda orang yang tekun ke dalam pemikiran bahwa mereka tidak dapat gagal.

Bill Gates

Barangsiapa yang berangkat menimba ilmu untuk mengamalkan ilmu, niscaya ilmu yang sedikit pun akan bermafaat baginya.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul “**Komunikasi Partisipatif pada Musrenbang di Desa Kota Bangun Tapung Hilir**” yang diajukan dengan tujuan melakukan penelitian dalam menyelesaikan studi Strata Satu (S1) pada program studi Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Riau

Pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih dengan tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga proposal penelitian ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Dr. Muhd. AR. Imam Riauan, M.I.Kom selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau.
2. Eka Fitri Qurniawati, M. I.Kom selaku ketua program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau.
3. Dr. Fatmawati, S.IP., MM selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan proposal penelitian ini.
4. Kepada seluruh Ibu dan Bapak Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan terima kasih dengan

setulus-tulusnya atas segala ilmu yang bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis.

5. Kepada Bapak dan Ibu karyawan Tata Usaha Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau yang telah membantu proses administrasi.
6. Teruntuk Melinda Irviani, Morettali Br Nainggolan, Siti Akodyah, Shindy Nefita Sari, Reni Alvia Lestari, Nurhadiyah, Synthia Ramadhani, Kezia Natasyah, dan Nelfi Hayati terima kasih sudah selalu memberikan semangat kepada saya. Dan terima kasih untuk selalu ada di dekat saya.

Akhir kata penulis berharap semoga penelitian ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi Nusa dan Bangsa, dan dapat menambah khasanah sakrawalah pemikiran bagi para pembaca.

Pekanbaru, Juni 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Judul (Cover)	
Persetujuan Tim Pembimbing Skripsi	
Persetujuan Tim Penguji Skripsi	
Berita Acara Ujian Komprehensif Skripsi	
Lembar Pengesahan	
Lembar Pernyataan	
Halaman Persembahan	
Halaman Motto	
Kata Pengantar.....	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel.....	xiii
Daftar Gambar	xiv
Daftar Lampiran	xv
Abstrak.....	xvi
Abstract.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi masalah penelitian	9
C. Fokus penelitian	10
D. Rumusan masalah	10
E. Tujuan dan manfaat penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Manfaat Penelitian	11

BAB II TINJUAN PUSTAKA

A. Kajian Literatur	12
1. Komunikasi Pembangunan.....	12
2. Komunikasi Partisipatif.....	17
3. Musrenbang Desa.....	21
B. Definisi Operasional.....	31
C. Penelitian Terdahulu	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan penelitian	34
B. Subjek dan objek penelitian	34
1. Subjek Penelitian.....	34
2. Objek Penelitian.....	35

C. Lokasi dan waktu penelitin	36
D. Sumber data	36
E. Teknik pengumpulan data	37
F. Teknik analisis data	38

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
1. Letak Geografis Desa	39
2. Penduduk	40
3. Pendidikan dan Kesehatan	42
4. Pekerjaan/Mata Pencaharian	43
5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kota Bangun	43
6. Pembangunan di Desa Kota Bangun Tahun 2016-2020	44
B. Hasil Penelitian	53
1. Proses Kegiatan musrenbang di Desa Kota Bangun	53
2. Keterlibatan Masyarakat Saat Berpartisipasi Dalam Musrenbang Desa Kota Bangun	60
3. Faktor penghambat komunikasi partisipatif pada musrenbang Desa Kota Bangun	73
C. Pembahasan Penelitian	78

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Agenda Musrenbang Desa Kota Bangun Tahun 2016-2020	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	32
Tabel 3.1 Subjek penelitian.....	35
Tabel 4.1 Komposisi Usia Penduduk Desa Kota Bangun 2019.....	41
Tabel 4.2 Pendidikan di Desa Kota Bangun	42
Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kota Bangun	42
Tabel 4.4 Sarana dan Tenaga Kesehatan Desa Kota Bangun	42
Tabel 4.5 Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Kota Bangun	43
Tabel 4.6 Rekapitulasi bidang pembangunan melalui APBDes Desa Kota Bangun Tahun 2016.....	45
Tabel 4.7 Rekapitulasi bidang pembangunan melalui APBDes Desa Kota Bangun Tahun 2017	45
Tabel 4.8 Rekapitulasi bidang pembangunan melalui APBDes Desa Kota Bangun Tahun 2018.....	46
Tabel 4.9 Rekapitulasi bidang pembangunan melalui APBDes Desa Kota Bangun Tahun 2019.....	46
Tabel 4.10 Rekapitulasi bidang pembangunan melalui APBDes Desa Kota Bangun Tahun 2020.....	47
Tabel 4.11 Hasil Musrenbang Desa Kota Bangun 2019	54
Tabel 4.12 Kategorinisasi hasil wawancara tentang musrenbang.....	65
Tabel 4.13 Jumlah kehadiran peserta musrenbang Desa Kota Bangun	67
Tabel 4.14 Rekapitulasi Usulan Kegiatan Musrenbang Desa Kota Bangun pada Tahun 2017-2019	67
Tabel 4.15 Daftar usulan kegiatan musrenbang Desa Kota Bangun pada tahun 2016-2020	6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pembangunan Masjid	7
Gambar 1.2 Pembangunan Puskesmas Pembantu.....	7
Bagan 4.1 Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kota Bangun.....	44
Gambar 4.1 Pembangunan Bowcoulvert Dusun III	48
Gambar 4.2 Pembangunan Drainase RT 11	48
Gambar 4.3 Pembangunan Gudang Kantor Desa dan Studio Musik.....	49
Gambar 4.4 Semenisasi Dusun I RT 02	50
Gambar 4.5 Semenisasi Pelataran Pujasera Dusun I.....	50
Gambar 4.6 Pembangunan Drainase Dusun RT 11	51
Gambar 4.7 Penggalian Parit Dusun IV	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Peneliti	88
Lampiran 2. Panduan Pertanyaan Peneliti	89



Abstrak

Komunikasi Partisipatif Pada Musrenbang di Desa Kota Bangun

Kecamatan Tapung Hilir

Oleh : Sri Indah Wahyuni

NPM : 179110015

Penelitian ini dilatarbelakangi karena pentingnya komunikasi partisipatif dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) desa. Terdapat banyak permasalahan dalam upaya mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan keinginan masyarakat melalui partisipasi dalam musyawarah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi partisipatif pada musrenbang desa kota bangun. Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari informan penelitian dan selanjutnya didukung oleh data sekunder yang diperoleh dari berbagai instansi atau dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Desa Kota Bangun selalu dilakukan pelaksanaan rapat musrenbang, dan terdapat beberapa masyarakat ikut hadir serta berpartisipasi dalam memberikan usulan dan pendapatnya mengenai program-program apa yang akan dilakukan dalam membangun desa. Pelaksanaan musrenbang di Desa Kota Bangun dilaksanakan dengan mengikuti tahapan dari pra, pelaksanaan sampai pada pasca musrenbang. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang tersebut belum optimal dan belum menyeluruh serta masih perlu ditingkatkan karena masih banyak masyarakat yang belum berpartisipasi dan terlibat langsung dalam proses pembuatan perencanaan program pembangunan yang ada pada setiap tahunnya. Kendala dalam membangun komunikasi partisipatif kepada seluruh warga masyarakat desa seperti: Lemahnya komitmen penguasa politik desa yakni kepala desa dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan keinginan dari masyarakat itu sendiri.. Lemahnya dukungan sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam melaksanakan sosialisasi program musrenbang desa dan penyebaran informasi tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa. Lemahnya dukungan anggaran desa yang tersedia. Rendahnya kemampuan lembaga legislatif dalam hal ini adalah BPD dalam mengakomodir konstituennya.

Kata Kunci: Komunikasi Partisipatif, Musrenbang, Desa Kota Bangun

Abstract

Participatory Communication at Musrenbang in Kota Bangun Village

Tapung Hilir District

By: Sri Indah Wahyuni

NPM : 179110015

This research is motivated by the importance of participatory communication in village development planning deliberations (musrenbang). There are many problems in the effort to realize development planning in accordance with the wishes of the community through participation in deliberation. This study aims to determine participatory communication in the urban village development planning musrenbang. This study uses a descriptive method using a qualitative approach. The location of the research was carried out in Kota Bangun Village, Tapung Hilir District. The source of data in this study is primary data obtained from research informants and further supported by secondary data obtained from various agencies or documents related to this research. Based on the results of the study, it was shown that Kota Bangun Village always held a musrenbang meeting, and there were several people who attended and participated in providing suggestions and opinions regarding what programs would be carried out in developing the village. The implementation of the Musrenbang in Kota Bangun Village is carried out by following the stages from pre, implementation to post-musrenbang. Community participation in the implementation of the Musrenbang has not been optimal and not comprehensive and still needs to be improved because there are still many people who have not participated and are directly involved in the process of making development program planning every year. Obstacles in building participatory communication to all members of the village community such as: Weak commitment of the village political authorities, namely the village head in fighting for the aspirations of the community and carrying out development according to the wishes of the community itself. Weak support for reliable human resources in carrying out the socialization of the village musrenbang program and disseminating information about the importance of community participation in the village musrenbang. Weak village budget support available. The low capacity of the legislature in this case is the BPD in accommodating its constituents.

Keywords: *Participatory Communication, Musrenbang, Kota Bangun Village*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintahan, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa musyawarah perencanaan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa dan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota. penatausahaan keuangan pemerintahan desa terpisah dari keuangan pemerintahan kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai dengan amanat yang diemban dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya harus berorientasi kebawah melibatkan masyarakat luas. Melalui pemberian wewenang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ditingkat daerah. Dengan

cara ini akan semakin mampu menyerap aspirasi masyarakat banyak sehingga pembangunan yang dilaksanakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat harus menjadi pelaku dalam pembangunan, masyarakat harus mampu merumuskan sendiri atas permasalahan yang dihadapi, merencanakan langkah-langkah yang dihadapi yang diperlukan, melaksanakan rencana yang telah diprogramkan dan dilaksanakan.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Masyarakat perlu dilibatkan karena masyarakatlah sebagai pihak yang menerima dampak dan manfaat dari perencanaan pembangunan tersebut. Pembangunan nasional merupakan suatu rangkaian usaha yang dilakukan secara berkesinambungan dalam semua bidang kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk menuju suatu keadaan yang lebih baik.

Perencanaan pembangunan dan pelaksanaan harus berorientasi ke bawah dan melibatkan masyarakat luas, melalui pemberian wewenang perencanaan dan pelaksanaan ditingkat daerah. Dengan cara ini pemerintah semakin mampu menyerap aspirasi masyarakat banyak, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat memberdayakan dan memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Rakyat harus menjadi pelaku dalam pembangunan, sehingga dari mulai perencanaan dan pelaksanaan, masyarakat mempunyai hak untuk terlibat dan memberikan masukan dan mengambil

keputusan, dalam rangka memenuhi hak-hak dasarnya, salah satunya melalui proses musrenbang.

Partisipasi masyarakat sebagai masukan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan usaha perbaikan kondisi taraf kondisi dan taraf hidup masyarakat desa. Antara partisipasi masyarakat dengan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri. Kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tanda adanya kemauan masyarakat untuk berkembang secara mandiri. Partisipasi masyarakat di dalam pembangunan dapat membutuhkan sebuah kemampuan masyarakat dalam sebuah pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, persepsi yang fundamental pembangunan masyarakat adalah peningkatan partisipasi demokrasi, dengan demikian, partisipasi tidak hanya ikut-ikutan tetapi, melainkan mengambil kepentingan masyarakat terutama pada masyarakat pedesaan.

Dasar-dasar pelaksanaan Musrenbang ini dilaksanakan atas dasar surat edaran bupati yang dalam pelaksanaannya menurut amanat Undang-Undang Nomor 25. Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Peraturan Desa dan Kelurahan diwajibkan menyusun rencana pembangunan jangka menengah di Desa/Kelurahan.

Musrenbang desa merupakan forum dialogis antara pemerintah desa dengan pemangku kepentingan lainnya dilaksanakan secara partisipatif untuk mendiskusikan dan menyepakati program pembangunan yang dapat memajukan keadaan desa/kampung. Dalam musrenbang kampung, pemerintah kampung dan berbagai

komponen warga bekerjasama memikirkan cara memajukan desanya melalui program pembangunan desa.

Pada dasarnya Musrenbang Desa dilaksanakan dengan tahapan yang terdiri dari :

1. Tahap Persiapan/ Pra-Musrenbang
2. Tahap Pelaksanaan
3. Tahap Pasca Pelaksanaan

Sebelum dilaksanakan musrenbang Kampung terlebih dahulu diselenggarakan pra musrenbang musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga ataupun Dusun. Masing masing RT mengidentifikasi kebutuhan dari masing masing RT, namun berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan tidak ada pra musrenbang yang dilakukan di kampung sungai gondang. Jadi tidak ada kebutuhan yang jelas untuk dibawa dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di tingkat kampung/desa.

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sangat penting dikarenakan dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan. sebab, merekalah yang menegetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya. Merekalah nantinya yang memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan tersebut. Jadi, untuk tercapainya keberhasilan pembagunan masyarakat desa maka segala program perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat.

Peranan masyarakat sangatlah penting karena dalam perencanaan pembangunan, masyarakatlah yang mengetahui permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan yang harus dipenuhi, sehingga keikutsertaan dan peran aktif masyarakat dapat mengkombinasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Sebagai akibat dari kurang aktifnya masyarakat dalam proses musrenbang sehingga daftar prioritas rencana pembangunan kampung yang seharusnya diajukan langsung oleh masyarakat cenderung diambil oleh para elit pemerintahan desa. Sehingga dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat yang sesungguhnya masih jauh dari harapan.

Fenomena ini dapat dilihat dari daftar hadir kegiatan musrenbang Desa Kota Bangun pada dokumen rencana kegiatan pembangunan tahun 2016-2020, kegiatan musrenbang desa dihadiri oleh perangkat-perangkat Desa Kota Bangun seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, kepala dusun, ketua Rukun Tetangga (RT), ketua Rukun Warga (RW), BPD, LPM, dan PKK. Tidak seluruh ketua RT atau RW yang menghadiri musyawarah dan beberapa masyarakat. Ada 21 RT dan 4 RW di Desa Kota Bangun.

Tabel 1.1 Agenda Musrenbang Desa Kota Bangun Tahun 2016-2020

No	Agenda	Undangan	Peserta
1	Musrenbang Desa Tahun 2016	50 orang	29
2	Musrenbang Desa Tahun 2017	50 orang	33
3	Musrenbang Desa Tahun 2018	60 orang	34
4	Musrenbang Desa Tahun 2019	60 orang	34
5	Musrenbang Desa Tahun 2020	70 orang	49

Sumber: Kantor Desa Kota Bangun

Berdasarkan tabel diatas diperoleh informasi bahwa kegiatan yang dilakukan oleh pihak desa sangat minim dihadiri masyarakat di Desa Kota Bangun. Ini terbukti dengan 5 kali dilaksanakannya musrenbang desa pada tahun 2016-2020 hanya sekitar setengah dari undangan para peserta yang hadir dan itupun mayoritas adalah perwakilan dari perangkat dan unsur desa itu sendiri. Keikutsertaan masyarakat dinilai masih jauh dari kata partisipatif, padahal pembangunan itu sendiri nantinya akan diperuntukan atas asas manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat.

Ketika proses Musyawarah rencana pembangunan desa tidak ada acara penentuan prioritas kegiatan yang akan dilakukan secara bersama-sama dalam forum musrenbang. Tidak selarasnya keinginan masyarakat dengan pemerintah sering terjadi sehingga masyarakat merasa dirugikan, oleh karena itu perlunya suatu proses mediasi untuk mencari titik tengah antara masyarakat dengan pemerintah, informasi sering diberikan tetapi masih bersifat satu arah saja.

Sarana bagi masyarakat Desa Kota Bangun dalam melakukan *feedback* terhadap pelaksanaan musrenbang Desa Kota Bangun saat ini masih sangat terbatas. Masyarakat juga dilibatkan dalam proses penyusunan proses kegiatan akan tetapi masukan dari masyarakat tidak dipertimbangkan dengan baik oleh pemerintah Desa Kota Bangun dan dalam memberikan usulanpun dibatasi. Tetapi partisipasi masyarakat hanya sebatas sampai disitu.

Pengambilan keputusan tetap ditangan pemerintah. Selain itu kurangnya pengawasan dan control dari masyarakat untuk mengawal proses kegiatan tersebut mengakibatkan adanya kecurigaan pengelolaan dana desa yang kurang baik.

Minimnya penyerapan aspirasi masyarakat juga terlihat ketika pemerintah desa melakukan pembangunan beberapa fasilitas publik tanpa adanya pembahasan pada musrenbang desa yang dilaksanakan. Adapun pembangunan fasilitas publik tersebut yaitu pembangunan Puskesmas Pembantu dan Masjid.

Gambar 1.1 Pembangunan Puskesmas Pembantu



Gambar 1.2 pembangunan Masjid Raya AL - Hidayah



Sumber: Dokumentasi Pribadi Oleh Peneliti, 2020

Berdasarkan Gambar 1.1 diatas tersebut merupakan bangunan perencanaan pembangunan puskesmas pembantu yang terletak di Desa Kota Bangun Kecamatan

Tapung Hilir, dengan musyawarah yang dilakukan pada awal tahun 2020 di aula kantor Desa Kota Bangun dan diresmikan pada Selasa 18 Februari 2020. Sedangkan gambar 1.2 merupakan gambar bangunan Masjid Raya Al Hidayah yang sudah dirancang dan dimusyawarahkan sejak tahun 2016 dan selesai pembangunan pada tahun 2019 dengan menghabiskan dana sampai puluhan milyar rupiah, dengan waktu pengerjaan yang cukup lama dan dikerjakan dengan bantuan masyarakat.

Oleh sebab itu fokus penelitian ini pada kegiatan Musrenbang pada tingkat desa dan kelurahan sebagai forum komunikasi *stakeholder* yang mewakili masyarakat desa atau kelurahan untuk menginspirasi dan merencanakan program pembangunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan pada tingkat desa dan kelurahan khususnya di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Namun kenyataannya komunikasi partisipatif masyarakat masih dirasakan sangat rendah karena aspirasi masyarakat tidak memberikan *feedback* yang sesuai dengan kondisi yang diinginkan masyarakat. Hal ini disebabkan karena hasil musyawarah masih merujuk pada ketetapan pemerintah tentang penggunaan dana desa sehingga komunikasi yang terjalin menjadi tidak efektif.

Keterlibatan masyarakat dalam menentukan pembangunan sangat penting karena harus ada (*two-way-communications*) komunikasi dua arah atau komunikasi timbal balik, untuk itu diperlukan adanya kerja sama yang diharapkan untuk mencapai cita-cita, baik cita-cita pribadi, maupun kelompok, untuk mencapai tujuan suatu organisasi (Missa dkk, 2013:25). Kerjasama tersebut terdiri dari berbagai maksud yang meliputi hubungan sosial atau kebudayaan. Hubungan yang terjadi

merupakan suatu proses adanya suatu keinginan masing-masing individu, untuk memperoleh suatu hasil yang nyata dan dapat memberikan manfaat untuk kehidupan yang berkelanjutan. Oleh sebab itu dalam konteks komunikasi organisasi khususnya pada Desa Kota Bangun diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musrenbang Desa Kota Bangun agar pola komunikasi yang terlaksana dalam proses pembangunan tidak hanya *top-down* namun pola komunikasi tersebut dapat terlaksana secara *bottom-up* sehingga komunikasi dua arah dapat tercapai dalam pembangunan yaitu antara masyarakat dan pemerintah desa.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut mengenai komunikasi partisipatif masyarakat yang terjalin antara perangkat desa atau dengan masyarakat maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Komunikasi Partisipatif Masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir”**.

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang menarik untuk dikaji adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya tingkat kehadiran masyarakat pada pelaksanaan musrenbang.
2. Pembangunan yang masih berpusat pada keinginan perangkat desa dan bukan keinginan masyarakat
3. Masyarakat dinilai pasif oleh pemerintah sehingga komunikasi yang terjalin tidak efektif dan tidak tepat sasaran.

C. Fokus Penelitian

Mengingat banyaknya identifikasi masalah yang telah dipaparkan maka penulis hanya akan memfokuskan penelitian pada **“Komunikasi Partisipatif pada Musrenbang di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir”**.

D. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan permasalahannya adalah:

- a) Bagaimana Komunikasi Partisipatif Masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir?
- b) Apa Faktor penghambat Komunikasi Partisipatif Masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui Komunikasi Partisipatif Masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir.
- b) Untuk mengetahui faktor penghambat Komunikasi Partisipatif Masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan koreksi bagi masyarakat dalam Komunikasi Partisipatif Masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang Desa.

b. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Program Studi Ilmu Komunikasi, serta menjadi rujukan bagi peneliti – peneliti berikutnya yang membahas permasalahan terkait.

c. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan dapat dikembangkan dalam bidang pendidikan Ilmu Komunikasi dan sebagai sumbangan pemikiran terutama dalam implementasi teori-teori yang diterapkan khususnya dalam hal Komunikasi Partisipatif Masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang Desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Literatur

1. Komunikasi Pembangunan

Konsep komunikasi pembangunan dapat dilihat dalam arti luas dan terbatas. Dalam arti yang luas, komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi (sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal-balik) di antara semua pihak yang terlihat dalam usaha pembangunan; terutama antara masyarakat dengan pemerintah, sejak dari proses perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan penilaian terhadap pembangunan.

Sedang dalam arti yang sempit, komunikasi pembangunan merupakan segala upaya dan cara, serta teknik penyampaian gagasan, dan keterampilan-keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan dan ditujukan kepada masyarakat luas. Kegiatan tersebut bertujuan agar masyarakat yang dituju dapat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam melaksanakan gagasan yang disampaikan tadi.

Zulkarnain Nasution (2002:142) dalam bukunya mengatakan, bahwa komunikasi pembangunan merupakan disiplin ilmu dan praktikum komunikasi dalam konteks negara-negara sedang berkembang, terutama kegiatan komunikasi untuk perubahan sosial yang berencana. Komunikasi pembangunan dimaksudkan untuk

secara sadar meningkatkan pembangunan manusiawi, dan itu berarti komunikasi yang akan menghapuskan kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan (2002:142).

Tujuan komunikasi pembangunan adalah untuk menanamkan gagasan-gagasan, sikap mental, dan mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan oleh suatu negara berkembang. Secara pragmatis, kata Quebral, dapatlah dirumuskan bahwa komunikasi pembangunan adalah komunikasi yang dilakukan untuk melaksanakan rencana pembangunan suatu negara.

Sebelum itu, Quebral di dalam buku Komunikasi Pembangunan Teori dan Penerapannya (Zulkarnain, 2002:143) menegaskan bahwa komunikasi pembangunan merupakan salah satu terobosan (break through) di lingkungan ilmu-ilmu sosial. Seperti mana terobosan lainnya, komunikasi pembangunan pada dasarnya merupakan gagasan dan konsep yang tidak mudah untuk diapresiasi atau dipahami sampai kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk tindakan. Di lingkungan ilmu-ilmu sosial, terobosan bukan merupakan obyek-obyek material yang dapat dilihat atau digenggam. Begitu pula halnya dengan komunikasi pembangunan. Karena itu menurut Quebral, komunikasi pembangunan sendiri merupakan suatu inovasi yang harus diusahakan agar diketahui orang dan diterima, sebelum ia digunakan.

Perkembangan pemikiran mengenai pemanfaatan dan peranan komunikasi dalam melaksanakan usaha membangun masyarakat memperlihatkan hubungan yang langsung dengan konsepsi yang dianut dalam merencanakan dan menafsirkan “pembangunan” itu sendiri. Dengan demikian, rumusan tentang pemanfaatan komunikasi ataupun peran yang diharapkan darinya dalam suatu usaha pembangunan

amat ditentukan oleh model pembangunan yang dilaksanakan itu sendiri (Jim, 2015:295-296).

Secara teoritis, ketika itu pula dikenal teori pembangunan yang menekankan kepada pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) sebagai tujuan yang utama. Singkatnya, ketika itu yang penting adalah bahwa disuatu negara terjadi pembangunan ekonomi dan fisik secara besar-besaran, yang diharapkan segera mendatangkan suasana kemakmuran bagi rakyatnya (Abu Huraerah, 2008).

Dalam mengaitkan peranan komunikasi dalam pembangunan dan konsep mengenai pembangunan itu sendiri, terdapat tiga tinjauan teoritis (Totok, 2015:84). Yang pertama adalah teori yang melihat pembangunan semata-mata sebagai proses pluralisasi masyarakat, politik, dan ekonomi dari suatu bangsa yang melaksanakan pembangunan tersebut. Pandangan ini pada umumnya dianut oleh para ekonom dan politisi liberal beserta para pengikutnya. Pada pokoknya mereka ini berpandangan bahwa hal-hal yang terpenting dalam suatu pembangunan adalah peningkatan pengelompokan tenaga kerja, diperbedakannya (diferensiasi) masyarakat menurut struktur dan fungsi yang jelas perbedaannya (distinktif), penganekaragaman (diversifikasi) pengelompokan berdasarkan kepentingan (*interest group*), dan keseimbangan yang dinamis antarberbagai kelompok dan kepentingan yang berkompetisi.

Teori kedua, memberi penekanan pada ditingkatkannya rasionalisasi sebagai unsur kunci (key elemen) proses pembangunan. Ke dalam kelompok ini termasuk Hegel dan pengikutnya yang menekankan pentingnya peranan rasio dalam proses

perkembangan sejarah. Selain itu, juga Marx dan kaum Marxis dengan pandangan mereka mengenai peran kunci kemajuan teknologi dalam pembentangan sejarah yang progresif. Kemudian termasuk pula Weber dan para pengikutnya yang mementingkan rasionalisasi kebudayaan dan birokrasi sebagai “mesin kembar” dari suatu proses sosial. Yang belakangan ini bahkan dikenal mendewakan negara sebagai sumber segala kewenangan dan keabsahan; sehingga apa yang dicirikan oleh kaum totaliter dan teknologi kasi dengan dalih prinsip tersebut dikenal sebagai penggampangan (vulgarisasi) dari aliran pemikiran ini.

Sedangkan teori ketiga, adalah pemikiran yang lahir dari kesadaran diri masyarakat di Dunia Ketiga, dengan konsep yang bertitik pusat pada prinsip melakukan pembebasan (liberation). Teori pembangunan yang ini amat dipengaruhi oleh tokoh-tokoh dari “Mazhab Frankfurt” yang disebut juga sebagai aliran neoMarxis. Di antara tokoh-tokoh pemikiran dalam aliran ini adalah Freire, Illich, Frank, Galtung, dan sebagainya.

Hakikat dari konsep pembangunan adalah suatu usaha yang dilakukan, dalam mengadakan perubahan-perubahan atau perkembangan menuju kearah yang lebih baik dari sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan tersebut dilaksanakan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat sesuai dengan pokok pembangunan di mana pembangunan itu harus memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat (Alfitri, 2011:204-205).

Pembangunan diartikan pula sebagai kegiatan yang dilakukan secara sadar oleh suatu masyarakat untuk mencapai suatu kondisi dan situasi yang lebih baik yang

meliputi bidang aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Melalui pembangunan nasional, bangsa Indonesia berusaha meningkatkan derajat kemanusiaannya sebagai bangsa yang memiliki kepribadian, sebagai bangsa yang memiliki harga diri, karena pembangunan nasional tidak lain adalah usaha bangsa Indonesia untuk lebih meningkat dalam aspek pembangunan karena diketahui bersama bahwa pembangunan dunia senantiasa mengalami perubahan, sehingga masyarakat Indonesia dapat meningkatkan derajat sebagai masyarakat Indonesia (Sahroni, 2000:12).

Komunikasi pembangunan adalah proses sosial yang direkayasa, yang kata intinya adalah perubahan sosial, rekayasa sosial model pembangunan terjadi besar-besaran di negara Dunia ke-3. Pembangunan berkisar pada bagaimana mengubah suatu masyarakat dengan mengubah sistem ekonominya (Sahroni, 2000:15).

Menurut (A. Mappadjanti Amien, 2003:52) perspektif ideal yang diharapkan sebenarnya adalah bagaimana masyarakat sebagai salah satu stakeholders kunci, diharapkan dapat menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan, sehingga akan tercipta sinergi berbagai kegiatan pembangunan dengan tetap memperhatikan tata nilai dan budaya/kultur yang ada dalam masyarakat itu sendiri.

Dalam proses perencanaan pembangunan haruslah dimulai dengan upaya menjadikan masyarakat akar rumput sebagai pihak yang harus mulai mengartikulasikan kebutuhan mereka dengan segala prioritas yang ditentukan sendiri, dalam wujud peran dan fungsinya turut serta menyampaikan pendapat,

mengidentifikasi dan menentukan alternatif pemecahan masalah-masalah pembangunan, termasuk di dalamnya membangun bentuk-bentuk organisasi kemasyarakatan untuk lebih mengekspresikan kepentingan dan aspirasi komunitasnya, sehingga apa yang menjadi rencana pemerintah akan berhasil secara efektif, dalam arti mencapai tujuan yang direncanakan serta mendorong mereka untuk memberikan kontribusi dan berbagi tanggung jawab untuk pencapaian tujuan itu (Martini, 2010:22).

2. Komunikasi Partisipatif

Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental atau pikiran dan emosi atau perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Partisipasi masyarakat mengacu kepada adanya keikutsertaan masyarakat secara nyata dalam suatu kegiatan. Partisipasi itu bisa berupa gagasan kritik membangun, dukungan dan pelaksanaan pendidikan. Dalam sistem pemerintahan yang kebijakannya bersifat *top-down*, partisipasi masyarakat dalam kebijakan-kebijakan yang di buat dan diimplementasikan tidak begitu dipermasalahkan, namun pada sistem pemerintahan yang *bottom-up*, tingginya partisipasi masyarakat dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan kebijakan tersebut (Cangara, 2014:52-53).

Komunikasi dapat menjadi jembatan yang menghubungkan antara individu dengan masyarakat dan pemerintah dengan masyarakat dalam perlakuan partisipan dan penentuan sebuah keputusan bersama. Menurut Srampickal (dalam Moni

Febrianti, dkk, 2020:4), komunikasi partisipatif pembangunan digambarkan sebagai sebuah proses komunikasi dua arah untuk menghindari proses komunikasi satu arah yang sering digunakan untuk menyebarluaskan pesan, mengirimkan informasi, atau membujuk orang untuk mengubah kebiasaan.

Rahim (dalam Satriani & Muljono, 2011:90) menyebutkan bahwa komunikasi partisipatif terdiri dari beberapa konsep antara lain:

1. Konsep komunikasi partisipatif *heteroglossia* merupakan penunjukan fakta bahwa sistem pembangunan dilandasi oleh berbagai kelompok dan komunitas yang berbeda-beda dengan berbagai variasi ekonomi, sosial, dan budaya yang saling mengisi satu sama lain.
2. Konsep dialogis adalah komunikasi transaksional yang memungkinkan pengirim dan penerima pesan saling berinteraksi dalam suatu periode waktu tertentu sampai pada makna-makna yang saling berbagi.
3. Konsep polifoni merupakan bentuk tertinggi dari suatu dialog, yakni ketika suara-suara yang tidak menyatu atau terpisah dan meningkat menjadi terbuka, memperjelas satu sama lain, dan tidak menutupi satu sama lain.
4. Konsep karnaval yang membawa semua varian dari semua ritual seperti legenda, komik, festival, permainan, parodi, dan hiburan secara bersama-sama. Proses ini dilakukan dengan tidak formal dan bisa juga diselingi humor dan canda tawa.

Penjelasan di atas juga dipertegas oleh Sinaga, Winoto, dan Perdana (dalam Mulyana, 2014:102) yang menyatakan bahwa penerapan komunikasi partisipatif memungkinkan terjadinya komunikasi personal yang dialogis antara masyarakat dan agen pembangunan, pemanfaatan media tradisional atau media rakyat yang lebih intensif, tumbuhnya aktivitas sosial secara berkelompok, dan berkembangnya media komunitas. Seperti diungkapkan Thomas (dalam Hadiyanto, 2008:32) bahwa komunikasi partisipatif berkaitan dengan akses terhadap pembangunan dan pendekatan hak asasi manusia dalam pembangunan yang berakar dari teori Paulo Freire (pendidik dari Brazil) di samping beberapa eksperimen tentang komunikasi alternatif yang muncul di akhir 60-an dan 70-an.

Prinsip pelaksanaan komunikasi partisipatif adalah menggunakan dialog atau komunikasi konvergensi atau lebih dikenal dengan nama dialogis. Tujuannya adalah merangkum solusi dari permasalahan bersama untuk mencapai kesepakatan bersama. Komunikasi partisipatif atau konvergensi bersifat dua arah yakni setiap partisipan memiliki hak yang sama untuk bicara ataupun didengar (Tufte, 2009:211). Sifat komunikasi partisipatif merujuk pada konsep komunikasi pembangunan bersifat partisipatif yang tidak hanya sebatas hadir dalam berbagai pertemuan tetapi lebih kepada menempuh cara-cara dialog untuk pengambilan keputusan.

Dialog merupakan prinsip berlangsungnya proses komunikasi partisipatif di mana setiap peserta memberikan usulan dalam bentuk komunikasi horizontal dengan tujuan untuk mendapatkan strategi komunikasi dalam menghadapi kesenjangan yang ada dan merangkum solusi yang ada. Bahasan dalam dialog tidak hanya bersifat

informatif namun lebih luas pada tataran yang mengidentifikasi masalah, menganalisisnya, serta menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi dengan mengedepankan kearifan lokal masyarakat setempat (Muchtar, 2016:62).

Makna komunikasi dalam paradigma komunikasi pembangunan partisipatif adalah pergeseran pesan dengan fokus menginformasikan dan membujuk untuk perubahan perilaku kepada penyediaan fasilitas untuk masyarakat dan pemerintah untuk menentukan masalah bersama. Dalam hal ini terjadi perubahan pendekatan *top down*, linear dan searah menuju pendekatan horisontal, interaktif dan dialogis. Komunikasi lebih dimanfaatkan untuk membantu proses belajar melalui pertukaran informasi secara transaksional. Masyarakat diharapkan mampu mengidentifikasi kebutuhan akan informasi dan komunikasi sehingga memungkinkan untuk mengurangi terjadinya konflik di dalam kelompok, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya.

Ruang partisipasi yang lebih terbuka akan mendorong masyarakat untuk dapat bergerak bersama menyampaikan aspirasinya. Hal tersebut menandakan bahwa partisipasi masyarakat sudah tergolong baik, karena sebagian masyarakat sudah berasumsi bahwa rencana pembangunan danau tempe selain dapat menjadi obyek wisata, masyarakat juga secara otomatis dapat menikmati hasil pembangunan. Hal ini sejalan dengan teori yang diuraikan oleh Sundariningrum (dalam Sugiyah, 2001:24), mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu;

1) Partisipasi Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

2) Partisipasi tidak langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya. Untuk itu sangat penting tingkat intensitas pertemuan masyarakat dengan Bappeda dalam musrenbang dalam hal ini diwakilkan kepada kepala desa, karena dengan hadirnya kepala desa berarti sudah ada aspirasi yang terwakilkan dari masyarakat. Baik itu pemberian saran maupun sekedar ikut mendengarkan dan menyampaikannya kembali kepada tetangga atau masyarakat lainnya, hal ini memperlihatkan bahwa tugas Bappeda sudah tepat pada fungsinya walaupun tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

3. Musrenbang Desa

Keputusan Menteri Dalam Negeri memberikan penjelasan bahwa pemerintah bersama dengan pemangku kepentingan bersama menyepakati rencana pembangunan, selanjutnya melalui surat keputusan yang sama pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai komposisi peserta Musrenbang Desa yang meliputi: keterwakilan wilayah, keterwakilan berbagai sektor, keterwakilan kelompok usia, keterwakilan kelompok

sosial dan jenis kelamin, keterwakilan 3 Unsur Tata Pemerintahan, keterwakilan berbagai organisasi lainnya yang menjadi pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan desa (Hanif, 2011:1).

Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik yakni pemerintah desa, bekerjasama dengan warga maupun para pemangku kepentingan lainnya (Rianingsih, 2008:3).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) telah menjadi istilah populer dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah dan desa, bersamaan dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam Pasal 1 ayat (21) dinyatakan bahwa Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Sedangkan untuk Musrenbang desa dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (11), yang menyebutkan bahwa Musrenbang desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa untuk menyepakati rencana kegiatan di desa.

Tujuan perencanaan pembangunan nasional menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, antara lain:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-daerah, antar-ruang, antar-fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pelaksanaan Musrenbang diawali dengan musrenbang desa, kemudian dilanjutkan dengan musrenbang kecamatan, lalu musrenbang pada tingkat kabupaten/kota, kemudian musrenbang provinsi, selanjutnya pelaksanaan musrenbang terakhir yaitu musrenbang tingkat nasional (Bekti, 2015:25).

Mekanisme perencanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari penetapan wadah perencanaan yang diatur dalam Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 0259/M.PPN/I/2005 dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/166/SJ tanggal 20 Januari 2005 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2005. Wadah perencanaan yang dimaksud dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal dengan menitikberatkan kepada konsultasi informal. Dalam konteks ini, keterlibatan para tokoh masyarakat, LSM, Kelompok Tani, organisasi pedagang dan organisasi masyarakat lainnya menjadi sangat penting untuk menjaring dan merumuskan setiap usulan rencana kegiatan pembangunan baik ditingkat desa/kelurahan maupun ditingkat kecamatan.

Perspektif ideal yang diharapkan sebenarnya adalah bagaimana masyarakat sebagai salah satu stakeholders kunci, diharapkan dapat menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan

pembangunan, sehingga akan tercipta sinergi berbagai kegiatan pembangunan dengan tetap memperhatikan tata nilai dan budaya/kultur yang ada dalam masyarakat itu sendiri.

Dalam proses perencanaan pembangunan haruslah dimulai dengan upaya menjadikan masyarakat akar rumput sebagai pihak yang harus mulai mengartikulasikan kebutuhan mereka dengan segala prioritas yang ditentukan sendiri dalam wujud peran dan fungsinya turut serta menyampaikan pendapat, mengidentifikasi dan menentukan alternatif pemecahan masalah-masalah pembangunan, termasuk di dalamnya membangun bentuk-bentuk organisasi kemasyarakatan untuk lebih mengekspresikan kepentingan dan aspirasi komunitasnya, sehingga apa yang menjadi rencana pemerintah akan berhasil secara efektif, dalam arti mencapai tujuan yang direncanakan serta mendorong mereka untuk memberikan kontribusi dan berbagi tanggung jawab untuk pencapaian tujuan itu (Wisnu, 2014:83).

Upaya untuk mewujudkan mekanisme perencanaan dari bawah ke atas (*bottom-up*) dan dari atas ke bawah (*top-down*) serta untuk lebih komprehensif dan terpadu sehingga dapat tercapai titik temu antara aspirasi dan kebutuhan daerah yang mendesak dengan kebijaksanaan dan strategi pembangunan nasional, oleh pemerintah telah dikeluarkan peraturan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

2. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 0259/M.PPN/I/2005 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/166/SJ tanggal 20 Januari 2005. Tentang petunjuk teknis penyelenggaraan musrenbang tahun 2005.

Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dari bawah ke atas dalam lingkup kabupaten / kota secara garis besar sebagai berikut:

1. Tingkat Desa / Kelurahan

Mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan diawali dengan tahap persiapan berupa musyawarah di tingkat dusun/RW dan kelompok-kelompok masyarakat (seperti misalnya kelompok tani/nelayan, kelompok pemuda, kelompok perempuan perempuan, dan lain-lain kelompok masyarakat) yang merupakan *stakeholder* di wilayah dusun/RW tersebut, membahas mengenai masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat setempat yang merupakan rencana kebutuhan pembangunan hasil musyawarah kelompok-kelompok masyarakat dimaksud, selanjutnya diajukan dan dijadikan sebagai salah satu bahan masukan (*input*) dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbang desa / kelurahan).

Musrenbang Desa/kelurahan dilaksanakan oleh tim penyelenggara musrenbang desa/kelurahan yang telah dibentuk atau ditetapkan sebelumnya oleh kepala desa/lurah, dan pesertanya terdiri dari komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang berada di desa/kelurahan, seperti; ketua RT/RW, kepala dusun/lingkungan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), ketua adat,

organisasi masyarakat, komite sekolah, kelompok tani/nelayan, dan lain-lain. Wakil-wakil dari peserta tersebut yang memaparkan masalah utama yang dihadapi serta merumuskannya untuk dijadikan sebagai prioritas rencana kegiatan pembangunan di desa/kelurahan bersangkutan.

Dalam musrenbang tersebut, kepala desa/lurah serta ketua dan anggota BPD bertindak sebagai narasumber yang menjelaskan tentang prioritas program/kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa/kelurahan. Adapun keluaran yang dihasilkan Musrenbang desa/kelurahan adalah:

- 1) Dokumen rencana kerja pembangunan desa/kelurahan yang berisi;
 - a. Prioritas rencana kegiatan pembangunan skala desa/kelurahan yang akan didanai oleh alokasi dana desa dan atau swadaya.
 - b. Prioritas rencana kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui dinas/institusi tingkat kabupaten atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk selanjutnya dibahas dalam forum musrenbang kecamatan.
- 2) Daftar nama delegasi desa yang telah dirumuskan oleh peserta musrenbang desa/kelurahan, untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan.

2. Tingkat Kecamatan

Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbang) adalah forum musyawarah stakeholder kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan yang menghasilkan daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan

tersebut menurut fungsi/SKPD atau gabungan SKPD, untuk disampaikan dan dibahas dalam forum Satuan Kerja Perangkat daerah (forum SKPD) dan musrenbang kabupaten/kota.

3. Tingkat Kabupaten / Kota

Mekanisme perencanaan pembangunan pada tingkat kabupaten didahului dengan kegiatan pada Forum Organisasi Perangkat Daerah (Forum OPD), kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota (Musrenbang Kabupaten) untuk menetapkan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan plafon / pagu dana baik berdasarkan fungsi OPD maupun yang dipilih berdasarkan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten/Kota; APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya, serta rancangan pendanaan untuk alokasi dana desa. Peserta forum OPD Kabupaten/Kota adalah musyawarah stakeholder Kabupaten/Kota untuk mematangkan Renja OPD hasil Forum OPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan renja OPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD adalah menjadi rujukan utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD) (2016:21-27).

Dalam proses pelaksanaannya, Musrenbang terdiri dari tiga tahap pra-Musrenbang, tahap Musrenbang dan pasca-Musrenbang.

1. Tahapan Pra-Musrenbang

Kegiatan pra-Musrenbang merupakan proses yang panjang dan bukan hanya sekedar persiapan teknis saja seperti penyebaran undangan, penyiapan

tempat dan konsumsi. Kegiatan utama pra-Musrenbang adalah menyiapkan substansi atau materi untuk menyusun rencana pembangunan desa secara baik. Tujuan pra-Musrenbang desa ialah pengorganisasian Musrenbang terdiri atas kegiatan-kegiatan:

- a) Pertama, pengorganisasian Musrenbang terdiri atas kegiatan-kegiatan:
 - (1) Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM); (2) Pembentukan Tim Pemandu Musrenbang Desa oleh TPM (2-3 orang); (3) Persiapan teknis pelaksanaan Musrenbang desa yaitu: penyusunan jadwal dan agenda Musrenbang desa. Kedua, pengumuman kegiatan Musrenbang desa dan penyebaran undangan kepada peserta dan narasumber (minimal 7 hari sebelum Hari-H). Ketiga, mengkoordinir persiapan logistik (tempat, konsumsi, alat dan bahan).
- b) Pengkajian desa secara partisipatif, terdiri atas kegiatan-kegiatan: (1) kajian kondisi, permasalahan dan potensi desa (per dusun/RW dan/per sektor/isu pembangunan) bersama warga masyarakat, (2) penyusunan data/informasi desa dari hasil kajian oleh tim pemandu.
- c) Penyusunan draf Rancangan Awal RKP dan hasil-hasil kajian terdiri atas kegiatan-kegiatan: (1) kaji ulang (review) dokumen RPJM Desa dan hasil-hasil kajian desa oleh TPM dan tim pemandu; (2) kajian dokumen/data/informasi kebijakan program dan anggaran daerah oleh TPM dan Tim Pemandu; (3) penyusunan draf Rancangan Awal RKP Desa dengan mengacu pada kajian tadi oleh TPM dan Tim Pemandu

2. Tahap Pelaksanaan Musrenbang

Musrenbang desa akan lebih ideal apabila diikuti oleh berbagai komponen masyarakat (individu/kelompok) yang terdiri dari:

- a) Keterwakilan wilayah (Dusun/RT/RW)
- b) Keterwakilan berbagai sektor ekonomi/ pertanian/ kesehatan/ pendidikan.
- c) Keterwakilan kelompok usia (generasi muda dan generasi tua)
- d) Keterwakilan kelompok sosial dan perempuan (tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama)
- e) Keterwakilan tiga unsur tata pemerintahan (pemerintah desa, kalangan swasta/bisnis, dan masyarakat umum)
- f) Serta keterwakilan berbagai organisasi yang menjadi pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan desa

Luaran Musrenbang desa adalah: Pertama, Daftar prioritas kegiatan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk tahun anggaran yang direncanakan. Kedua, daftar prioritas masalah daerah yang ada di desa untuk disampaikan di Musrenbang kecamatan. Ketiga, daftar nama tim delegasi desa yang akan mengikuti Musrenbang kecamatan. Keempat, berita acara Musrenbang desa.

3. Tahapan Pasca Musrenbang

Pada tahap pasca-Musrenbang ini dibahas mengenai:

- a) Rapat kerja tim perumus hasil Musrenbang desa: (1) penerbitan SK kades untuk tim delegasi desa; (2) penyusunan daftar prioritas

masalah desa untuk disampaikan di Musrenbang kecamatan; (3) penyusunan RKP desa sampai menjadi SK kades.

- b) Pembekalan tim delegasi desa oleh TPM (termasuk tim pemandu) agar: (1) menguasai data/ informasi dan penjelasan mengenai usulan yang akan dibawa tim delegasi ke Musrenbang kecamatan, serta (2) penguatan kemampuan lainnya (wawasan teknik komunikasi, presentasi)
- c) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD Desa) dengan mengacu pada Dokumen RKP Desa

Dalam menyelenggarakan suatu kegiatan pada sebuah organisasi pemerintahan diperlukan adanya landasan hukum yang mendukung terselenggaranya seluruh hal untuk mendukung kesuksesan program. Terdapat beberapa undang-undang dan peraturan yang mendasari pelaksanaan kegiatan Musrenbang desa. Salah satunya adalah Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan kerangka dasar otonomi daerah yang mengamanatkan pelaksanaan pembangunan dari bawah secara partisipatif. Selain itu juga, terdapat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjabarkan lebih detail mengenai kedudukan pemerintahan desa dalam otonomi daerah termasuk kewajiban desa dalam mengelola dan menyelenggarakan sistem pemerintahannya.

Khusus Musrenbang desa diterbitkan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa yang memuat petunjuk teknis penyelenggaraan Musrenbang untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) lima tahunan dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) setiap tahunnya. Rencana kerja dan pembangunan tersebut tentunya harus didukung oleh anggaran sebagai sumber pembiayaan. Untuk itu pada setiap RPJM maupun RKP Desa disusun dokumen anggaran yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Landasan hukum yang dipergunakan dalam menunjang penyusunan APB Desa ini adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (dalam Agung, 2015:24).

B. Definisi Operasional

1. Komunikasi Partisipatif adalah proses penyampaian pesan yang melibatkan seluruh stakeholder dalam proses pengambilan keputusan.
2. Musrenbang adalah sebuah mekanisme perencanaan, sebuah institusi perencanaan yang ada di desa setempat dan sebagai mekanisme untuk mempertemukan usulan/kebutuhan masyarakat (*bottom up planning*) dengan apa yang akan di programkan pemerintah (*top down planning*).

C. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	Setyadiraharja (2018)	Efektifitas pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) Tingkat Kecamatan di Kecamatan di Kota Tanjungpinang	Hasil penelitian membuktikan Dari keseluruhan hasil Indeks Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Tanjungpinang Timur Di Kota Tanjungpinang dengan jumlah nilai indeks 3.96 sehingga dapat dikategorikan efektif.
2	Mandafi (2015)	Analisis Komunikasi Partisipatif Masyarakat Pada Pelaksanaan Musrenbang Desa Resapan Banjir	Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa 1). Intensitas pertemuan antara masyarakat dengan pemerintah dalam musrenbang sudah mulai terbangun, sehingga interaksi dan komunikasi menjadi baik lebih pada masyarakat tanpa terkecuali, hanya saja keterwakilan perempuan andilnya masih kurang, 2). Masyarakat juga sudah mulai dilibatkan dalam proses penyusunan proses kegiatan, dan memberikan usulan, 3). Kebijakan pemerintah pada musrenbang adalah pembangunan bendung bak sedimen.
3	Muldi (2018)	Komunikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-musrenbang (studi kasus RKPD Jabar online).	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa RKPD Jabar <i>online</i> adalah inovasi dibidang pelayanan sistim informasi publik pemerintah daerah Jawa Barat. RKPD Jabar online selain memuat hasil Musrenbang desa, kecamatan, kabupaten dan kota juga membuka ruang bagi masyarakat Jawa Barat
4	M. Dirga Firgiawan (2018)	Partisipasi masyarakat pada musyawarah pembangunan (Musrenbang) kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng (Studi Komunikasi Pembangunan)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) partisipasi masyarakat di Kelurahan Mallilingi yaitu tokoh masyarakat yang selalu mengingatkan dan menggugah kesadaran masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan musrenbang. Adapun faktor penghambatnya adalah berkurangnya kesadaran mereka karena kesibukan pribadi yang tidak ingin ditinggalkan dan anggapan bahwa pembangunan adalah urusan pemerintah serta ketidakpuasan masyarakat dalam realisasi program.

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
5	Mochammad Rindho Nugroho (2019)	Partisipasi masyarakat dalam musyawarah pembangunan (Musrenbang) di Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Musrenbang di desa Catur Tunggal Kecamatan Depok tidak hanya menjadi ruang publik bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan membuat konsensus. Namun juga menjadi momentum untuk menyatukan pikiran dan tekad dalam upaya menyukseskan program pembangunan desa yang ada. Adapun faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam musrenbang adalah kesamaan niat dan rasa saling percaya antara masyarakat dan pemerintah, sehingga dapat menjadikan musrenbang sebagai ruang publik agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kehendak masyarakat.

Sumber: Olahan Penulis, 2021

Persamaan peneliti jika dibandingkan dengan beberapa penelitian diatas adalah sama sama berfokus pada partisipasi masyarakat dalam musyawarah pembangunan desa dalam perspektif komunikasi. Kemudian juga metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, data dikumpulkan juga wawancara dan observasi lapangan. Sama sama ingin mengetahui proses partisipasi masyarakat dalam musrenbang dari kaca mata komunikasi dan ingin mengetahui faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat tersebut.

Perbedaan peneliti apabila dibandingkan dengan penelitian diatas bahwa lokasi penelitian berbeda, subjek dan objek penelitian juga tidak ada yang sama. Terdapat juga perbedaan dari teori yang digunakan, sehingga hasil penelitiannya juga berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan juga terlihat pada definisi operasional yang digunakan. Rumusan dan masalah yang digunakan satu sama lain juga berbeda sehingga menjadikan pembahasan penelitiannya juga berbeda.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam menganalisa permasalahan yang diteliti. Menurut Moleong (2010:34) mendefinisikan bahwa metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Peneliti mencoba untuk memahami gejalanya dengan menginterpretasikan terhadap berbagai permasalahan yang terjadi pada tiap-tiap situasi.”

Penelitian ini memberikan pemahaman dan penyelesaian masalah berdasarkan fakta dan kenyataan yang berada di lokasi penelitian. Penilaian dilakukan berdasarkan fenomena yang di terjadi dilapangan dalam penelitian kualitatif.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Moleong (2010:132) mendeskripsikan subjek penelitian ini sebagai informan yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Subjek penelitian yaitu keseluruhan objek dimana terdapat beberapa narasumber atau informan yang

dapat memberikan informasi tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini mengambil subjek yaitu masyarakat Desa Kota Bangun yang berpartisipasi atau pernah berpartisipasi dalam kegiatan Musrenbang desa. Setelah melakukan Observasi ke Kantor Kepala Desa Kota Bangun masyarakat yang pernah berpartisipasi dalam Musrenbang Desa Kota Bangun sebanyak 18 Orang pada Tahun 2019. Adapun yang akan menjadi subjek penelitian ini antarlain:

Tabel 3.1 Subjek Penelitian

No	Nama	Keterangan
1	Sayugi	Kepala Desa
2	Elfian Manurung	Sekretaris Desa
3	Agus Manasih	Anggota BPD
4	Suparlin	Anggota BPD
5	Sutiman	Anggota BPD
6	Supardi	Ketua RW
7	Tajana	Ketua RW
8	Junaidi	Ketua RW
9	Thamrin	Ketua RW
10	Tugino	Masyarakat
11	Giswanti	Masyarakat
12	Fitri	Masyarakat
13	Irul	Pemuda
14	Ponidi	Masyarakat
15	Mulyono	Masyarakat
16	Sugito	Masyarakat
17	Meiyanti	Masyarakat

Sumber: Desa Kota Bangun, 2020

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah segala sesuatu permasalahan yang hendak di teliti (Alwasilah, 2002:115). Dengan kata lain objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi fokus dari sebuah penelitian. Jika kita bicara tentang objek penelitian, objek inilah yang akan dikupas dan dianalisis oleh peneliti berdasarkan teori-teori yang sesuai dengan objek penelitian. Objek penelitian ini yaitu komunikasi

partisipatif masyarakat dalam musrenbang Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar selama bulan Januari sampai Juni 2021 dalam proses tahapan pengumpulan data yang berhubungan dengan topik penelitian.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder beriku penjelasannya:

1. Sumber Data Primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan ataupun masyarakat yang berpartisipasi dalam Musrenbang Desa Kota Bangun.
2. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen – dokumen. Dalam penelitian ini data sekunder, yaitu berupa dokumentasi selama penelitian seperti hasil musrenbang dan masukan – masukan atau partisipasi dari masyarakat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participan observation*), wawancara mendalam (*indepth interview*), dan dokumentasi (Catherine Marshall, Gretchen B. Rosman, dalam Sugiyono, 2010:225). Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Wawancara yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan sesi tanya jawab terhadap orang-orang yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian, baik secara tertulis maupun secara lisan guna mendapatkan informasi mengenai masalah yang sedang diteliti oleh penelitian. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*indepth interview*). Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan mudah, mulai dengan informasi fakta, tidak pada pertanyaan multiple, tidak menanyakan pertanyaan pribadi sebelum building rapport, mengulangi jawaban untuk klarifikasi, dan memberikan kesan positif.

2. Observasi merupakan pengamatan dengan melakukan pencatatan atau pengkodean perilaku individu atau suasana, dan kondisi. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas kepada pengamatan yang dilakukan baik

secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan penginderaan kepada objek penelitian yaitu masyarakat Desa Kota Bangun. Observasi ini secara signifikan dilakukan peneliti dengan menjadikan peneliti sebagai pengamat terlibat atau berperan serta. Ini merupakan keharusan yang dituntut agar data-data hasil penelitian memiliki derajat kepercayaan yang tinggi, memiliki keterandalan dan dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan model analisis data yang dikemukakan oleh Miles and Huberman, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah diwawancarai kurang memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

Analisis data merupakan suatu proses penyusunan agar data dapat ditafsirkan. Penelitian ini bersifat deskriptif, maka teknik penggambaran dengan kata-kata atau kalimat dan dipisahkan menurut kategorinya untuk mendapatkan kesimpulan data dan memperoleh kesimpulan yang akurat dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Desa

Desa Kota Bangun merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dengan luas wilayah 2,343,49 Ha dengan jumlah penduduk 5.142 pada tahun 2019, desa ini memiliki tata pemerintahan dengan tiga kaur, empat dusun serta dua puluh satu rukun tetangga, yang di kepalai oleh seorang kepala desa.

Desa kota bangun ini berada di perbatasan kabupaten Kampar dan kabupaten Siak. Jarak tempuh desa Kota Bangun ke ibu kota Kecamatan sekitar 8 KM, ke ibu kota Kabupaten 80 KM dan ke ibu kota Provinsi 76 KM. Desa Kota Bangun ini terletak di kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar adapun batas – batas wilayah desa Kota Bangun adalah:

- 1) Sebelah utara dengan Desa Cinta Damai Kecamatan Tapung Hilir
- 2) Sebelah selatan dengan Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir
- 3) Sebelah barat dengan Desa Kota Aman Kecamatan Tapung Hilir
- 4) Sebelah timur dengan Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir

Dilihat dari letak geografisnya, mayoritas Desa Kota Bangun merupakan daerah daratan dan sebagai dataran tinggi. Sama halnya dengan daerah lain Desa Kota Bangun ini juga beriklim tropis dengan dua musim yakni musim kemarau dan

musim hujan. Desa Kota Bangun ini terbentuk karna adanya transmigrasi umum pada tahun 1985 yang dimaksudkan transmigrasi umum disini adalah para transmigran memiliki lahan kosong yg dibaeri oleh pemerintah agar di kelola menjadi lahan pertanian atau palawija. Namun pada kenyataannya sektor pertanian ternyata belum mampu mengangkat masyarakat dari kemiskinan.

Kemudian masyarakat beralih kepada perkebunan kelapa sawit yang dalam hal ini dikelola di bapak angkatkan oleh PT. Sinar Mas group. Yang kemudian setelah sawit sudah berbuah dan menghasilkan maka hasil di bagikan kepada pemilik lahan setelah di potong biaya bibit dan perawatan dan kemudian setelah hutang pemilik lahan kepada PT Sinar Mas lunas maka hasil seutuhnya hasil di ambil oleh pemilik lahan dengan perjanjian buah sawit di beli / kontrak dengan pabrik kelapa sawit (PKS) PT Sinar Mas. Dan saat ini penduduk desa Kota Bangun khususnya yang asli Transmigran rata-rata sudah hidup makmur.

2. Penduduk

Salah satu syarat terbentuknya suatu daerah adalah tidak terlepas dari peran adanya suatu penduduk yang mendiami suatu daerah, maka dari itu jelaslah peran penduduk sangatlah penting dalam suatu daerah. Selain sebagai syarat terbentuknya suatu daerah penduduk juga berperan sebagai objek serta subjek dari pembangunan itu sendiri.

Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar memiliki jumlah penduduk hingga tahun 2019 berjumlah sekitar 5.142 jiwa, yang mana

mayoritas penduduk di Desa ini berjenis kelamin Laki-laki sekitar 2.686 jiwa, sedangkan Perempuan 2.456 jiwa. Adapun jumlah kepala keluarganya adalah sebanyak 1.273 KK dan kepadatan penduduk sebanyak 219 jiwa/KM². Berikut penulis tampilkan komposisi usia penduduk di Desa Kota Bangun:

Tabel 4.1 Komposisi Usia Penduduk Desa Kota Bangun 2019

No	Laki-laki	Jumlah	Perempuan	Jumlah
1	Usia 0-6 Tahun	210	Usia 0-6 Tahun	176
2	Usia 7-12 Tahun	447	Usia 7-12 Tahun	364
3	Usia 13-18 Tahun	436	Usia 13-18 Tahun	377
4	Usia 19-25 Tahun	254	Usia 19-25 Tahun	258
5	Usia 26-40 Tahun	533	Usia 26-40 Tahun	553
6	Usia 41-55 Tahun	569	Usia 41-55 Tahun	554
7	Usia 56-65 Tahun	143	Usia 56-65 Tahun	102
8	Usia 66-75 Tahun	90	Usia 66-75 Tahun	70
9	Usia 75 Keatas	4	Usia 75 Keatas	2
	Jumlah Laki-laki	2.686	Jumlah Perempuan	2.454

Sumber: Profil Desa Kota Bangun Tahun 2019

Berdasarkan dari data diatas, data jumlah penduduk Desa Kota Bangun sesuai usia yakni yang dibawah 18 tahun berjumlah 2010 jiwa, jumlah ini nantinya beberapa tahun mendatang akan menjadi calon tenaga kerja yang memerlukan kemampuan kualitas SDM yang memadai. Sedangkan jumlah usia produktif di Desa Kota Bangun dengan rentang usia 19 sampai dengan 65 tahun dengan jumlah paling besar yang menginjak angka 2966 jiwa, artinya Desa Kota Bangun memiliki keadaan yang menguntungkan dilihat dari penduduk usia produktif yang dimiliki desa. Sehingga pada usia produktif ini masyarakat Desa Kota Bangun dapat melakukan kinerja sesuai dengan profesinya yang diharapkan dapat mengoptimalkan potensi sumberdayanya manusianya.

3. Pendidikan dan Kesehatan

Tabel 4.2 Pendidikan di Desa Kota Bangun

Kategori	Tingkatan	Jumlah Pengajar	Jumlah Siswa	Rasio
Sekolah Formal	TK	6	70	11
	SD	36	707	19
	SMP	24	443	18
	SMA	36	635	17
Jumlah Total		102	1.855	

Sumber: Profil Desa Kota Bangun Tahun 2019

Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kota Bangun

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Tamat SD/ sederajat	41	23	64
Tamat SMP/ sederajat	321	343	664
Tamat SMA/ sederajat	1.190	1.121	2.311
Tamat D-3/ sederajat	8	5	13
Tamat S-1/ sederajat	70	53	123
Jumlah Total	1.630	1.545	3.175

Sumber: Profil Desa Kota Bangun Tahun 2019

Tabel 4.4 Sarana dan Tenaga Kesehatan Desa Kota Bangun

Tenaga Kesehatan	Jumlah	Sarana Kesehatan	Jumlah
Dokter Umum	3	Puskesmas pembantu	1
Dukun Bersalin	1	Poliklinik	3
Bidan	2	Toko obat	7
Perawat	10	Praktek dokter	2
		Rumah bersalin	2

Sumber: Profil Desa Kota Bangun Tahun 2019

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari di Kantor Desa Kota Bangun tentang profil desa tahun 2019. Desa Kota Bangun memiliki sarana dan prasarana berupa gedung kantor yang baik dan layak. Terdapat balai desa yang baik untuk digunakan, listrik dan air juga tersedia untuk mencukupi kebutuhan masyarakat sehari-hari.

4. Pekerjaan/Mata Pencaharian

Tabel 4.5 Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Kota Bangun

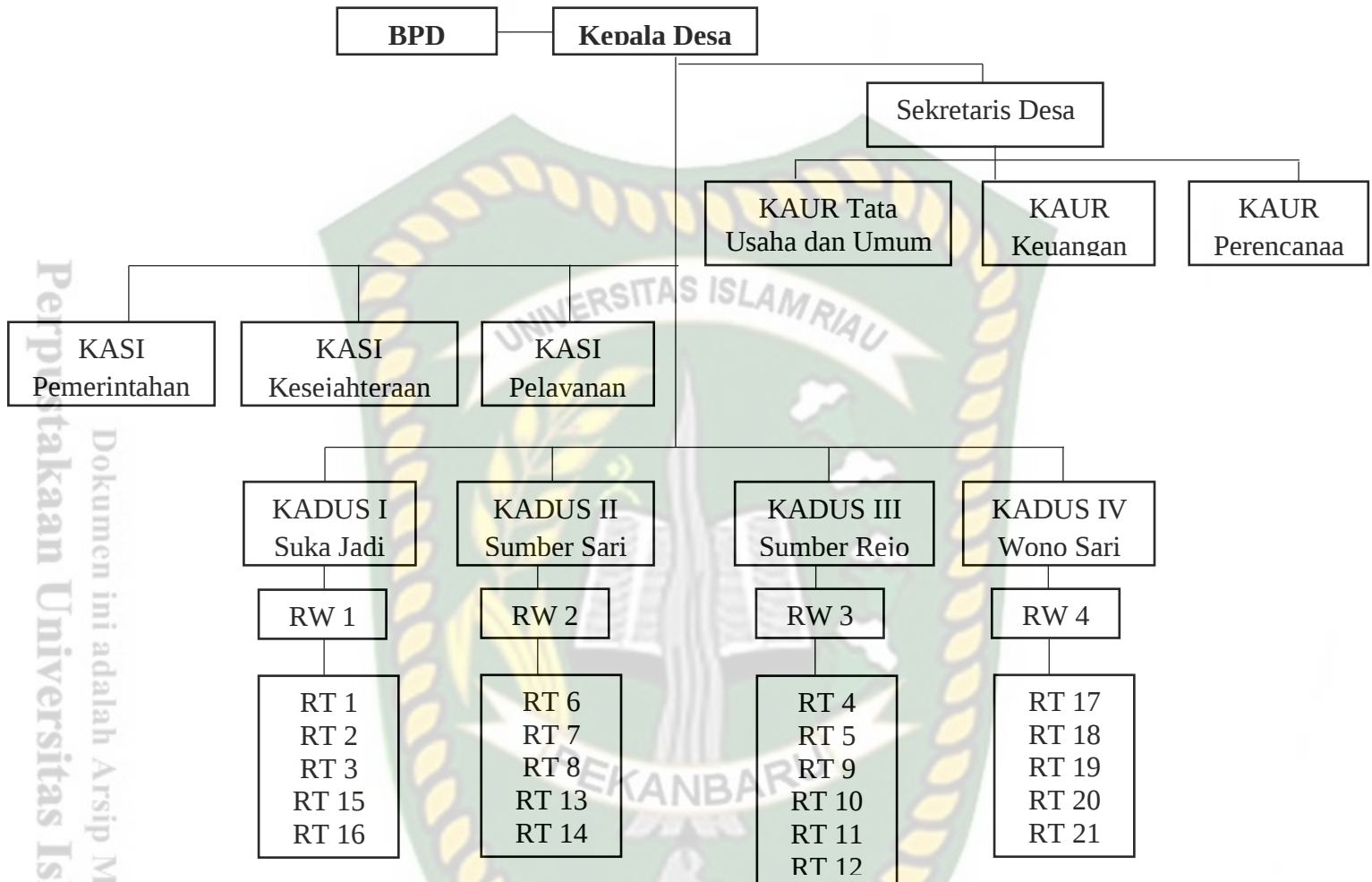
Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Petani	830	0	830
Buruh tani	277	0	277
Pegawai negeri sipil	15	15	30
Peternak	196	2	198
Montir	25	0	25
Dokter swasta	2	1	3
Bidan swasta	0	9	9
TNI	7	0	7
Polri	1	0	1
Guru swasta	26	57	83
Pedagang keliling	11	4	15
Wiraswasta	25	15	40
Belum bekerja	191	177	368
Pelajar	981	870	1.851
Ibu rumah tangga	0	1.259	1.259
Perangkat desa	11	2	13
Buruh harian lepas	40	45	85
Pemilik usaha warung/RM	12	0	12
Jasa penyewaan alat pesta	4	0	4
Pengrajin industri rumahan	6	0	6
Satpam	4	0	4
Jumlah total (orang)	2.664	2.456	5.120

Sumber: Profil Desa Kota Bangun Tahun 2019

5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kota Bangun

Desa merupakan sebuah wilayah administratif yang berada dibawah tingkat kecamatan, dimana ini merupakan kumpulan dari beberapa pemukiman kecil yang disebut dengan Rukun Warga dan Rukun Tetangga. Pemerintahan umum yang berlaku di Desa Kota Bangun meliputi: Organisasi Pemerintahan Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa. Dibawah ini penulis akan ditampilkan sebuah bagan tentang Struktur Organisasi Desa Kota Bangun.

Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kota Bangun



Sumber: Profil Desa Kota Bangun Tahun 2019

6. Pembangunan di Desa Kota Bangun Tahun 2016-2020

Pada rentang tahun 2016-2020 Desa Kota Bangun telah banyak melaksanakan pembangunan. Berbagai macam pembangunan tersebut bertujuan agar memberikan akses dan bermanfaat bagi masyarakat. Berikut ini adalah data mengenai rekapitulasi bidang pembangunan di Desa Kota Bangun 5 tahun terakhir:

**Tabel 4.6 Rekapitulasi Bidang Pembangunan Melalui
PBDes Kota Bangun Tahun Anggaran 2016**

No	Uraian Pembangunan	Lokasi	Volume	Anggaran	Realisasi
1	Pembangunan saluran irigasi	Dusun II	62 M	Rp 45.000.000	Rp 44.145.000
2	Semenisasi jalan	Dusun II	44 M	Rp 23.000.000	Rp 22.287.000
3	Semenisasi jalan	Dusun III	75,5 M	Rp 27.000.000	Rp 25.810.000
4	Semenisasi jalan	Dusun III	23 M	Rp 20.000.000	Rp 18.229.000
5	Semenisasi jalan	Dusun IV	46 M	Rp 23.000.000	Rp 21.560.000
6	Pembangunan drainase	Dusun I	180 M	Rp 45.000.000	Rp 43.118.000
7	Pembangunan gorong2	Dusun IV	4x1xQ20	Rp 6.000.000	Rp 5.874.000
8	Pembangunan gorong2	Dusun I	4x1xQ20	Rp 6.000.000	Rp 5.874.000
9	Pembangunan talud jalan	Dusun I	538 M	Rp 145.000.000	Rp 142.499.000
10	Pembangunan lapangan futsal	Desa	690 M ²	Rp 290.000.000	Rp 284.998.000
11	Pembangunan halaman desa	Dusun I	90 M ²	Rp 10.000.000	Rp 18.362.000
12	Pembangunan tower air	Desa	2,5x8,2 M	Rp 95.000.000	Rp 90.739.000
Jumlah				Rp 735.000.000	Rp 712.497.000

Sumber: APBDes Kota Bangun Tahun Anggaran 2016

**Tabel 4.7 Rekapitulasi Bidang Pembangunan Melalui
APBDes Kota Bangun Tahun Anggaran 2017**

No	Uraian Pembangunan	Lokasi	Volume	Anggaran	Realisasi
1	Pemeliharaan poros desa	Dusun I	-	Rp 75.000.000	Rp 74.000.000
2	Pemeliharaan jalan lingkungan	Dusun I	-	Rp 50.000.000	Rp 48.485.000
3	Pemasangan dan perawatan PJU	Dusun V	-	Rp 20.000.000	Rp 19.672.000
4	Pembangunan TPT	Dusun II	-	Rp 48.000.000	Rp 45.025.000
5	Pembangunan SPA	Dusun II	-	Rp 148.000.000	Rp 145.745.000
6	Program lantai rumah sehat	Dusun IV	-	Rp 45.000.000	Rp 42.600.000
7	Program pembangunan berbasis lingkungan	Dusun III	-	Rp 170.000.000	Rp 164.759.000
8	Perawatan gedung polindes	Dusun III	1 Unit	Rp 13.000.000	Rp 11.805.000
9	Perawatan gedung PKK desa	Dusun I	1 Unit	Rp 19.000.000	Rp 17.709.000
10	Pelebaran jalan dan taman desa	Dusun II	-	Rp 140.000.000	Rp 137.441.000
11	Pembangunan gedung PKK	Dusun I	1 Unit	Rp 24.000.000	Rp 22.000.000
Jumlah				Rp 752.000.000	Rp 729.241.000

Sumber: APBDes Kota Bangun Tahun Anggaran 2017

**Tabel 4.8 Rekapitulasi Bidang Pembangunan Melalui APBDes
Kota Bangun Tahun Anggaran 2018**

No	Uraian Pembangunan	Lokasi	Volume	Anggaran	Realisasi
1	Boxcoulvert	Dusun III	1,5x1,5x6 M	Rp 47.000.000	Rp 45.714.000
2	Drainase dusun II jalur 2	Dusun II	0,7x0,7x210M	Rp 172.000.000	Rp 168.379.000
3	Drainase dusun II jalur 3	Dusun II	0,7x0,7x160M	Rp 130.000.000	Rp 129.028.000
4	Drainase dusun IV RT.21	Dusun IV	0,6x0,6x100M	Rp 70.000.000	Rp 68.811.000
5	Drainase RT 12	Dusun III	0,7x0,7x50 M	Rp 45.000.000	Rp 44.077.000
6	Drainase RT 15	Dusun I	0,5x0,6x104M	Rp 69.000.000	Rp 67.394.000
7	Drainase RT 11	Dusun III	0,7x0,7x80 M	Rp 68.000.000	Rp 67.352.000
8	Gudang kantor desa	Dusun I	1 Unit	Rp 55.000.000	Rp 52.767.000
9	Landmark desa	Dusun I	1 Unit	Rp 76.000.000	Rp 74.150.000
10	MCK pujasera dan sumur bor	Dusun I	1 Unit	Rp 58.000.000	Rp 56.734.000
Jumlah				Rp 790.000.000	Rp 769.428.000

Sumber: APBDes Kota Bangun Tahun Anggaran 2018

**Tabel 4.9 Rekapitulasi Bidang Pembangunan Melalui APBDes
Kota Bangun Tahun Anggaran 2019**

No	Uraian Pembangunan	Lokasi	Volume	Anggaran	Realisasi
1	Semenisasi RT 02	Dusun I	100x2x0,12M	Rp 45.928.900	Rp 45.358.900
2	Drainase RT 11	Dusun III	200x0,7x0,7M	Rp 140.701.000	Rp 139.476.000
3	Drainase RT 13	Dusun II	95x0,7x0,7M	Rp 84.824.000	Rp 83.650.000
4	Drainase RT 21	Dusun IV	0,6x0,6x100M	Rp 64.009.000	Rp 63.839.000
5	Drainase RT 14	Dusun II	48x0,7x0,7M	Rp 36.796.700	Rp 35.646.700
6	Drainase RT 13	Dusun II	45x0,7x0,7M	Rp 35.685.000	Rp 34.264.000
7	Drainase RT 05	Dusun III	130x0,5x0,5M	Rp 73.354.000	Rp 73.118.000
8	Drainase RT 01	Dusun I	82x0,5x0,5M	Rp 47.064.000	Rp 46.385.000
9	Boxcoulvert lapangan bola	Dusun III	18x1x0,7M	Rp 71.797.000	Rp 71.161.000
10	Boxcoulvert RT 20	Dusun IV	6x1,5x1,5M	Rp 48.167.000	Rp 47.982.000
11	Semenisasi plataran pujasera	Dusun I	75x10x0,12M	Rp 116.227.000	Rp 116.027.000
12	Drainase RT 04 (cekdam)	Dusun III	15x1x1,2M	Rp 41.664.000	Rp 40.012.000
Jumlah				Rp 806.225.600	Rp 796.928.600

Sumber: APBDes Kota Bangun Tahun Anggaran 2019

**Tabel 4.10 Rekapitulasi Bidang Pembangunan Melalui APBDes
Kota Bangun Tahun Anggaran 2020**

No	Uraian Pembangunan	Lokasi	Volume	Anggaran	Realisasi
1	Insentif kader pembangunan manusia	Dusun I	12 Bulan	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
2	Pembelian sarana pencegahan virus corona	Dusun I	1 Kegiatan	Rp 50.618.400	Rp 50.618.400
3	Semenisasi jalan	Dusun II	100x2x0,12M	Rp 44.073.000	Rp 43.757.000
4	Drainase RT 11	Dusun III	116x0,7x0,7M	Rp 95.524.000	Rp 93.907.000
5	Drainase RT 15	Dusun II	50x0,6x0,6M	Rp 41.067.000	Rp 39.509.000
6	Drainase RT 10	Dusun III	90x0,6x0,6M	Rp 70.196.000	Rp 66.506.000
7	Penggalian parit	Dusun I	650x0,6x0,6M	Rp 21.014.000	Rp 19.404.000
8	Penggalian parit	Dusun II	650x0,6x0,6M	Rp 21.014.000	Rp 19.404.000
9	Penggalian parit	Dusun III	650x0,6x0,6M	Rp 21.014.000	Rp 19.404.000
10	Penggalian parit	Dusun IV	650x0,6x0,6M	Rp 21.014.000	Rp 19.404.000
11	Sosialisasi stunting	Dusun I,II,III,IV	1 Kegiatan	Rp 8.735.000	Rp 8.735.000
12	Penanganan keadaan mendesak desa	Dusun I,II,III,IV	9 Bulan	Rp 504.000.000	Rp 504.000.000
Jumlah				Rp 901.869.400	Rp 888.338.400

Sumber: APBDes Kota Bangun Tahun Anggaran 2020

Berdasarkan rekapitulasi pelaksanaan pembangunan diatas, maka terlihat bahwa pembangunan di Desa Kota Bangun dilaksanakan secara terus menerus di setiap tahunnya menggunakan dana desa. bah dari segi jumlah anggaran yang digelontorkan tersebut nominalnya semakin meningkat di setiap tahunnya. Berbagai macam pembangunan yang telah berhasil terealisasi dengan baik, dimana tujuannya adalah untuk memberikan manfaat atau nilai guna bagi seluruh masyarakat desa. Setiap tahun pembangunan yang dilaksanakan ialah bervariasi, tergantung kebutuhan atau keinginan dari masyarakat dan perangkat desa memilih dan melaksanakan pembangunan di bidang tertentu. Berikut adalah beberapa potret dari pembangunan yang dilaksanakan di Desa Kota Bangun pada tahun 2016-2020:

Gambar 4.1 Pembangunan Boxculvert Dusun III



Sumber: Olahan Penulis, 2021

Gambar 4.1 diatas merupakan pembangunan boxculvert yang terletak di dusun III Desa Kota Bangun. Boxculvert tersebut mempunyai volume 1,5 meter x 1,5 meter x 6 meter. Anggaran yang disiapkan adalah sebesar Rp 47.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 45.714.000. Pembangunan boxculvert ini dilaksanakan pada tahun 2017 dan termasuk ke dalam APBDesa tahun 2018.

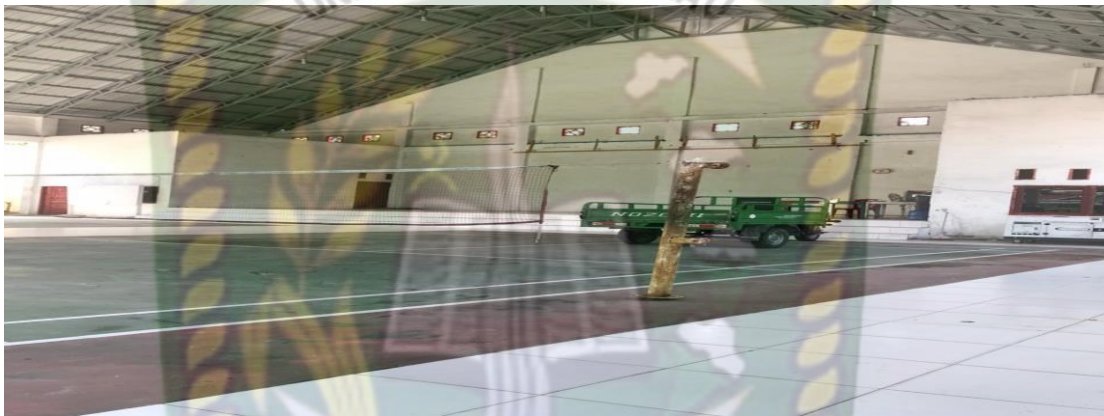
Gambar 4.2 Pembangunan Drainase RT 11



Sumber: Olahan Penulis, 2021

Gambar 4.2 diatas adalah pembangunan drainase di RT 11 Dusun III Desa Kota Bangun. Drainase tersebut dibangun dengan luas volume yaitu 200 meter x 0,7 meter x 0,7 meter. Anggaran yang disediakan adalah sebesar Rp 140.701.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 139.476.000. Pembangunan drainase ini menggunakan dana desa dan termasuk ke dalam APBDesa tahun anggaran 2018.

Gambar 4.3 Pembangunan Gudang Kantor Desa dan Studio Musik



Sumber: Olahan Penulis, 2021

Gambar 4.3 diatas merupakan pembangunan gudang kantor desa dan studio musik Desa Kota Bangun yang terletak di Dusun I. Gudang kantor desa dan studio musik tersebut dibangun 1 unit dengan anggaran yang disiapkan sebesar Rp 55.000.000, yang pada realisasinya memakan anggaran sebesar Rp 52.767.000. Gudang ini berfungsi sebagai tempat menyimpan berbagai macam peralatan desa seperti tenda, kursi, meja, dan inventaris lain. Kemudian studio musik juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan cara menyewa untuk acara pesta, namun terkadang juga digunakan dalam acara peringatan tertentu. Pembangunan gudang desa dan studio musik masuk dalam APBDesa tahun anggaran 2018.

Gambar 4.4 Semenisasi Dusun I RT 02



Sumber: Olahan Penulis, 2021

Gambar 4.4 diatas merupakan semenisasi yang dilaksanakan di RT 02 Dusun I Desa Kota Bangun. Semenisasi jalan tersebut memiliki panjang 100 meter dengan lebar 2 meter dan ketebalan jalan 12 centi meter. Pembangunan ini sudah dipersiapkan anggarannya sebesar Rp 45.928.900, dan pada realisasinya memakan anggaran sebesar Rp 45.358.900. Semenisasi jalan di RT 02 ini dilaksanakan dengan menggunakan APBDesa tahun anggaran 2019.

Gambar 4.5 Semenisasi Pelataran Pujasera Dusun I



Sumber: Olahan Penulis, 2021

Gambar 4.5 adalah semenisasi pelataran pusat jajanan rakyat (pujasera) yang terletak di Dusun I Desa Kota Bangun. Semenisasi ini memiliki dibangun dengan panjang 75 meter, lebar 10 meter dengan ketebalan 12 centi meter. Pada awalnya pembangunan semenisasi ini dianggarkan sebesar Rp 116.227.000, dan pada pelaksanaannya anggaran yang dihabiskan sebanyak Rp 116.027.000. semenisasi pelataran pujasera ini bersumber dari APBDesa tahun anggaran 2019.

Gambar 4.6 Pembangunan Drainase RT 11



Sumber: Olahan Penulis, 2021

Gambar 4.6 diatas merupakan pembangunan drainase yang terletak di RT 11 Dusun III Desa Kota Bangun. Drainase ini dibangun dengan panjang 116 meter, lebar 70 CM dan tinggi 70 CM. Pada tahap perencanaannya anggaran yang disiapkan untuk pembangunan drainase ini adalah sebesar Rp 95.524.000. Dan pada realisasinya anggaran yang digunakan adalah sebesar Rp 93.907.000. Pembangunan drainase di RT 11 ini masuk ke dalam APBDesa Kota Bangun tahun anggaran 2020.

Gambar 4.7 Penggalian Parit Dusun IV



Sumber: Olahan Penulis, 2021

Gambar 4.7 merupakan penggalian parit yang terletak di Dusun II Desa Kota Bangun. Parit tersebut digali sepanjang 650 meter dengan lebar 60 CM dan kedalaman 60 CM. Penggalian parit ini pada awalnya biayanya dianggarkan sebesar Rp 21.014.000. Sedangkan realisasi anggarannya adalah sebesar Rp 19.404. Anggaran untuk penggalian parit di Dusun IV ini bersumber dari APBDesa tahun anggaran 2020. Parit ini berfungsi sebagai wadah untuk mengalirnya air dan sebagai upaya dalam mengatasi banjir.

B. Hasil Penelitian

1. Proses Kegiatan Musrenbang di Desa Kota Bangun

Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) diselenggarakan secara berjenjang mulai dari tingkatan yang terendah yakni desa/kelurahan, sampai tingkat tertinggi yakni nasional. Penelitian ini berfokus pada kegiatan musrenbang dan kaitannya dengan komunikasi partisipatif di Desa Kota Bangun.

Salah satu ciri perencanaan partisipatif adalah terfokus pada kepentingan masyarakat, yaitu berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat. Hal ini dapat diperoleh melalui kegiatan penyelidikan yaitu sebuah proses untuk mengetahui, menggali dan mengumpulkan masalah dan kebutuhan-kebutuhan bersifat lokal yang berkembang di masyarakat.

Kegiatan ini idealnya dilakukan sebelum pelaksanaan musrenbang tingkat desa. Kegiatan penyelidikan dimulai dari tingkat dusun melalui mekanisme kepala dusun dibantu perangkatnya mengumpulkan warga untuk menggali dan mengumpulkan masalah-masalah dan kebutuhan masyarakat, sehingga diperoleh daftar masalah dan kebutuhan secara menyeluruh yang perlu diseleksi lebih lanjut untuk dipilih mana masalah dan kebutuhan yang dianggap prioritas untuk dijadikan usulan prioritas dalam tahapan musrenbang.

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Musrenbang adalah keterlibatan dalam rapat atau musyawarah, kesediaan dalam memberikan data dan informasi, keterlibatan dalam penyusunan rancangan rencana pembangunan, keterlibatan dalam penentuan skala prioritas kebutuhan dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan.

Dalam rapat atau musyawarah, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kepada penyelenggara dan peserta lainnya. Pada saat ini mereka biasanya mengungkapkan kekecewaan mereka tentang beberapa aspirasi mereka yang tidak dijadikan sebagai program pilihan untuk direalisasikan. Pada kesempatan ini juga mereka berusaha meyakinkan bahwa program mereka sebagai masyarakat berbasis kebutuhan yang mendesak. Selain itu masyarakat juga mengungkapkan berbagai program-program yang diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah pada realisasi Musrenbang berikutnya.

Tabel 4.11 Hasil Musrenbang Desa Kota Bangun Tahun 2019

Tahun	Nara Sumber	Peserta Musrenbang	Hasil Musrenbang
2019	Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi PMD Tapung Hilir, Unsur Kecamatan Tapung Hilir, Dinas Pendidikan, Ketua BPD	34 orang	Pendidikan: • Penambahan volume/tunggu dramas yang dibangun di SDN 004 dengan panjang 100 M tinggi 25 CM • Rehab lokal SDN 014 sebanyak 2 lokal • Pembangunan perpustakaan desa/taman bacaan • Pembangunan Aula SDN 004 Kesehatan: • Penambahan honor kader • Pembelian timbangan elektrik Perikanan: • Bantuan bibit ikan patin 40.000 ekor dan pakan 30 ton • Bantuan bibit ikan nila 30.000 ekor dan pakan 20 ton Pertanian: • Penambahan pupuk subsidi Infrastruktur: • Pengajuan aspal jalan 3 KM • Pagar lapangan sepak bola • Paving block • Drainase pasar • Aspal hotmix

Sumber: Berita Acara Musrenbang Desa Kota Bangun Tahun 2019

Tabel 4.11 diatas memperlihatkan hasil dari musrenbang yang diselenggarakan Desa Kota Bangun pada tahun 2019. Dimana dari 60 orang peserta rapat yang diundang untuk menghadiri musrenbang hanya 34 orang saja yang dapat hadir, itu artinya setengahnya lagi berhalangan hadir dengan alasan masing-masing. Pada jika saja lebih dari 50 orang peserta rapat yang hadir maka akan dihasilkan suatu hasil musyawarah yang berbobot dan tentunya membuahkan suatu keputusan yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Kota Bangun secara keseluruhan.

Persoalan dalam membangun komunikasi partisipatif antara pemerintah desa dengan masyarakat memang menjadi salah satu permasalahan yang selalu hadir dan sulit untuk ditemukan jalan keluarnya. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, apakah masyarakat yang acuh atau memang masyarakat tersebut tidak mengetahui informasi akan adanya musrenbang tingkat desa yang dapat diikutinya. Hal tersebut sesuai dengan penuturan yang disebutkan salah satu warga Desa Kota Bangun yang penulis temui untuk dimintai pendapatnya tentang upaya pemerintah desa dalam membangun komunikasi yang partisipatif dalam kegiatan musrenbang desa. Pemerintah desa dinilai tidak menggali masalah dan kebutuhan masyarakat, dan jika didengarpun aspirasi masyarakat namun jarang yang bisa terealisasi. Berikut adalah petikan hasil wawancara dengan salah satu warga Desa Kota Bangun yakni Ponidi:

“Pertemuan-pertemuan di masyarakat yang membahas tentang perencanaan pembangunan jarang sekali atau belum pernah dilaksanakan, ada juga pertemuan untuk pelaksanaan gotong royong dalam rangka 17 agustusan, setelah itu tidak ada lagi diskusi yang mengarah pada pembahasan masalah dan kebutuhan masyarakat, jadi saya rasa belum pernah ada dan kalaupun ada

musrenbang desa saya belum pernah ikut karena tidak diundang, yang diundang biasanya hanya kepala dusun” (wawancara dilakukan pada 25 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa pemerintah desa belum melakukan penjangkaran masalah dan kebutuhan masyarakat mulai dari level akar rumput sampai pelaksanaan musrenbang desa serta tidak semua masyarakat dilibatkan dalam kegiatan penyelidikan untuk mengetahui dan menggali masalah dan kebutuhan masyarakat dalam memenuhi prinsip kesesuaian antara rencana pembangunan dengan masalah dan kebutuhan masyarakat.

Ketidaktahuan warga akan kesesuaian rencana dengan masalah dan kebutuhan juga dibenarkan oleh Anggota BPD Kota Bangun yakni Bapak Agus Manasih yang mengatakan bahwa ketidaktahuan warga akan kesesuaian rencana dengan masalah dan kebutuhan sebagai akibat dari kurangnya keterlibatan warga dalam proses perencanaan pembangunan itu sendiri. Berikut petikan wawancaranya:

“Inilah yang masih menjadi PR bagi aparat pemerintah desa sebagai penyelenggara kegiatan musrenbang desa. Masyarakat belum memahami sepenuhnya arti pelaksanaan musrenbang, masyarakat juga hanya tau mengusulkan tanpa mengetahui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang berasal dari musrenbang tidak tampak pada pelaksanaannya. Padahal pemerintah desa seharusnya harus memberikan informasi yang utuh dan melakukan sosialisasi secara maksimal kepada seluruh masyarakat desa”. (wawancara dilakukan pada 16 Februari 2021).

Beberapa pandangan diatas menunjukkan bahwa pemahaman warga tentang proses perencanaan pembangunan belum merata di seluruh masyarakat Desa Kota Bangun. sehingga kurang memahami ketika ditanya kesesuaian antara rencana dengan masalah dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat

disimpulkan bahwa belum terdapat kesesuaian antara rencana dengan masalah dan kebutuhan masyarakat.

Menindaklanjuti respon yang berasal dari masyarakat yang mengikuti musrenbang tetapi yang diharapkan masyarakat belum dapat terealisasi, maka Sayugi selaku Kepala Desa Kota Bangun memberikan penjelasan akan persoalan tersebut kenapa hal itu bisa terjadi dan usulan dari masyarakat belum bisa direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat, beliau menyebutkan seperti berikut ini:

“Apa yang diputuskan dalam musrenbang berdasarkan masukan dari masyarakat, berdasarkan masalah dan kebutuhan yang dijangkau melalui kegiatan penyidikan mulai tingkat rendah ataupun tidak akan disampaikan pada musrenbang kecamatan untuk dipilih mana prioritas kegiatan yang akan diusulkan dari sekian banyak kegiatan yang diusulkan pada musrenbang desa. Pada pelaksanaannya mungkin ada masyarakat yang kecewa ketika usulannya tidak terakomodasi dalam prioritas kegiatan desa, tetapi kita harus berlapang dada, karena tidak mungkin semua usulan dapat diakomodasi mengingat jumlah anggaran yang terbatas” (wawancara dilakukan pada 10 Februari 2021).

Selain persoalan sulitnya mengakomodir usulan yang diinginkan oleh masyarakat kepada pihak pemerintah desa, kembali menurut Sayugi yang merupakan Kepala Desa Kota Bangun:

“Walaupun sulit merealisasikan usulan seluruh warga, namun masih terdapat hal positif dalam pelaksanaan musrenbang di desa kita. Yakni pemerintah desa cukup berhasil dalam mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang desa. Terbukti dengan cukup banyaknya masyarakat yang hadir pada setiap kegiatan musrenbang yang kita selenggarakan. Hal ini tentu karena pemerintah desa menjalin komunikasi dan informasi yang jelas kepada masyarakat, dan terbangun komunikasi partisipatif pada saat pelaksanaan musrenbang di Desa Kota Bangun”. (wawancara dilakukan pada 10 Februari 2021).

Melihat akan pentingnya komunikasi partisipatif dalam sebuah musyawarah perencanaan pembangunan suatu desa, maka masyarakat sangat dituntut untuk berperan aktif dan ikut berpartisipasi mulai dari tahap perencanaan suatu musyawarah pembangunan yang ada di desa. Menurut penuturan salah satu masyarakat Desa Kota Bangun yaitu saudari Fitri, beliau menyatakan sebagai berikut:

“Partisipasi masyarakat di Desa Kota Bangun dalam menghadiri kegiatan musrenbang cukup banyak walaupun tidak konsisten pada setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena terdapat komunikasi yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam musrenbang. Masyarakat dilibatkan dalam pembuatan keputusan walaupun tidak semua usulan masyarakat dapat diterima, namun dari segi komunikasi dalam partisipasi di dalam proses musrenbang sudah terjalin dengan cukup baik”. (Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Februari 2021).

Selain itu, narasumber lain yang berasal dari Dusun Sumber Rejo memberikan pendapatnya mengenai pelaksanaan Musrenbang yang ada di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir yaitu saudara Irul :

“Berdasarkan pengamatan saya dalam pelaksanaan Musrenbang Desa Kota Bangun pada Tahun 2019, masyarakat datang dalam menghadiri rapat Musrenbang karena ingin mengetahui program-program apa saja yang akan dilaksanakan desa dalam waktu 1 tahun yang akan mendatang”. (wawancara dilakukan pada 27 Februari 2021).

Pelaksanaan Musrenbang di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir, peran dan partisipasi dari kaum perempuan juga sangat diperlukan dalam melaksanakan pembangunan desa dan dapat berpeluang besar mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang ada. Salah satu narasumber dari kaum perempuan yaitu Giswanti seorang ibu rumah tangga dari Dusun Sumber Sari mengungkapkan bahwa :

“Saya ikut tahun lalu rapat karena Kepala Desa Kota Bangun orangnya baik dan melakukan komunikasi yang baik dan terukur kepada sebagian besar warganya. Selain membangun komunikasi yang baik Kepala Desa Kota Bangun juga banyak merealisasikan kebutuhan warga yakni dengan adanya pembangunan desa lancar dan merata dan saya merasakan hal baik itu”. (wawancara pada 26 Februari 2021).

Selain itu terdapat seorang narasumber dari tokoh masyarakat dari kalangan perempuan lainnya menambahkan mengenai adanya partisipasi wanita dalam pelaksanaan Musrembang di Desa Kota Bangun adalah Meiyanti, beliau mengungkapkan:

“Beberapa masyarakat khususnya ibu-ibu banyak yang datang di acara rapat seperti itu karena ada beberapa hal seperti komunikasi pemerintah dan masyarakat sudah baik, kami diberi kesempatan untuk berbicara di forum dan kegiatan ibu-ibu PKK seperti pengajian yang dilakukan ibu-ibu majelis taklim, kegiatan bersih-bersih di desa yang dilakukan mendapat dukungan dari pemerintah” (wawancara dilakukan pada 26 Februari 2021).

Melihat berbagai pendapat masyarakat diatas baik yang berasal dari tokoh masyarakat maupun dari kalangan masyarakat biasa dan dari perwakilan laki-laki maupun perempuan, dapat dikatakan bahwa pemerintah desa berhasil dalam membangun dan menjaga komunikasi yang partisipatif antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan musrenbang desa, walaupun masih banyak kekurangan disana sini dan belum sempurna. Namun hal tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi agar ke depannya menjadi lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya.

2. Keterlibatan Masyarakat Saat Berpartisipasi Dalam Musrenbang Desa

Kota Bangun

Tingkat kehadiran warga dalam kegiatan penyelidikan pada umumnya rendah, karena kegiatan penyelidikan biasanya diselenggarakan pada malam hari. Seperti yang dikemukakan oleh salah seorang Ketua RW Desa Kota Bangun yakni Junaidi yang menuturkan pendapatnya sebagai berikut:

”Saya memang hadir dalam proses musrenbang pada setiap kali penyelenggaraannya, namun tingkat partisipasi dari masyarakat di RW saya masih terbilang minim. Hal ini dikarenakan jadwal musrenbang yang biasanya dilaksanakan pada malam hari, padahal tidak banyak warga yang bisa ikut pada waktu tersebut.” (wawancara dilakukan pada 23 Februari 2021).

Ada juga warga yang hadir dalam suatu musrenbang di Desa Kota Bangun yakni Mulyono, beliau mengungkapkan sebagai berikut:

”Pernah saya hadir dalam kegiatan musrenbang desa yang membahas masalah dan kebutuhan masyarakat, waktu itu memenuhi undangan kepala dusun, namun apa yang kita usulkan dalam kegiatan tersebut ternyata tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa.” (wawancara dilakukan pada 25 Februari 2021).

Rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam kegiatan musrenbang desa yang membahas tentang masalah dan kebutuhan di tingkat dusun dibenarkan salah satu Ketua RW di Desa Kota Bangun yakni Thamrin. Beliau menuturkan sebagai berikut:

”Memang sudah menjadi kebiasaan jika ada acara yang melibatkan warga selalu dilakukan malam hari dan terkadang bersamaan dengan acara lainnya, namun sangat jarang diikuti mengingat aktivitas warga sangat tinggi hingga sore jelang malam hari.” (wawancara dilakukan pada 15 Maret 2021).

Dari tiga pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kesibukan masyarakat mencari nafkah menjadi penyebab rendahnya tingkat kehadiran warga dalam kegiatan tersebut, walaupun pemilihan waktu kegiatan musrenbang diselenggarakan pada malam hari dengan alasan bahwa pada malam hari semua warga terlepas dari aktivitas rutinnnya sehingga dapat meluangkan waktu untuk berkumpul membahas masalah dan kebutuhan yang dihadapi.

Penyebab lain dari rendahnya tingkat kehadiran warga dalam kegiatan penyelidikan adalah kegiatan tersebut dirasakan warga tidak memberikan perbaikan dalam kehidupan warga. Masalah dan kebutuhan yang diusulkan tidak disertai upaya pemecahan oleh pemerintah, sehingga hasil kegiatan penyelidikan hanya merupakan daftar masalah dan kebutuhan, yang membuat sebagian warga enggan menghadiri kembali kegiatan penyelidikan di tahun berikutnya.

Ada kecenderungan dalam daftar usulan kegiatan pada musrenbang desa didominasi kegiatan fisik pada seluruh wilayah di desa kota bangun. Bahkan pada daftar usulan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk masing-masing dusun, secara keseluruhan merupakan kegiatan yang terkait dengan bidang prasarana seperti pada Dusun Suka Jadi, Dusun Sumber Sari, Dusun Sumber Rejo dan Dusun Wono Sari dengan prioritas kegiatan yang diusulkan adalah kebutuhan yang mendesak bagi warga yaitu perkerasan dan pengaspalan jalan.

Kebutuhan tersebut bahkan merupakan usulan lama yang belum terealisasi sehingga diusulkan kembali tahun ini. Sedangkan usulan dusun yang berbentuk pinjaman modal untuk usaha rumah tangga belum terakomodir menjadi usulan

prioritas desa pada pelaksanaan musrenbang desa. Seperti yang dikemukakan oleh salah seorang warga Dusun 4 Wono Sari Desa Kota Bangun yakni Tugino yang berprofesi sebagai wiraswasta menuturkan pendapatnya sebagai berikut:

”Karena saya dan keluarga membuka usaha penjualan susu kedelai dan bubuk kopi namun kekurangan modal, padahal sedang banyak pesanan dari masyarakat Kota Bangun bahkan sampai ada permintaan dari desa lain yang ada di Kecamatan Tapung Hilir, terkadang karena kurang modal jadi ga beroperasi, kalau ada pinjaman dari pemerintah bisa berkembang lagi usahanya.” (wawancara dilakukan pada 26 Februari 2021).

Salah satu faktor keberhasilan suatu pembangunan yang dilaksanakan di suatu desa dapat terlihat apabila seluruh lapisan aspek masyarakat mulai dari aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat yang ada serta peran yang diberikan oleh para tokoh-tokoh pemuda yang ada dengan terlibat langsung dan bekerja sama dengan baik dengan aparat pemerintah desa setempat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan program-program pembangunan sampai pada tingkat pengawasan jalannya pembangunan yang ada. Sehingga komunikasi partisipatif juga harus dibangun dan dijaga oleh pemerintah Desa Kota Bangun. Peran pemuda sangat sentral dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang ada di desa.

Menurut Sutiman yang merupakan salah satu anggota BPD mengungkapkan tentang adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrembang yang diadakan di Desa Kota Bangun:

“Saya ikut rapat karena ada undangan dari panitia pelaksana Musrembang selain itu saya ikut karena memang mau melihat desa saya lebih maju pembangunannya serta saya akui pemerintah setempat menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat dan kami selaku anggota legislatif desa”. (wawancara dilakukan pada 24 Februari 2021).

Pernyataan tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan oleh salah satu anggota BPD lainnya yakni Suparlin, dengan mengatakan :

“Sangat banyak manfaat daripada musrenbang itu sendiri, mulai dari mendengar keluhan dan kebutuhan masyarakat sampai evaluasi terhadap pembangunan desa yang pada tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan oleh pemerintah desa. Kami selaku BPD akan memanfaatkan dengan semaksimal mungkin forum ini dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi kami selaku anggota parlemen desa”. (wawancara dilakukan pada 26 februari 2021).

Hal yang berbeda diungkapkan oleh salah satu Anggota BPD Desa Kota Bangun tentang pelaksanaan musrembang di Desa Kota Bangun diantaranya apa yang diungkapkan oleh Agus Manasih:

“Partisipasi pemuda di Desa Manurung khususnya di Dusun Caleru masih kurang aktif dalam mengikuti rapat semacam itu karena kebanyakan pemuda dan masyarakat yang lain masih bersifat acuh tak acuh dalam mengikuti rapat karena suara pemuda masih kurang didengar”. (wawancara dilakukan pada 27 februari 2021).

Selain Agus Manasih yang berkomentar tentang kurangnya partisipasi kalangan pemuda dalam menghadiri pelaksanaan musrembang di Desa Kota Bangun, salah satu Ketua RW di Desa Kota Bangun yakni Supardi mengungkapkan hal demikian:

“Dalam pelaksanaan Musrembang (Musyawarah Rencana Pembangunan) di tingkat desa, kami selaku Ketua RW masih kurang berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan karena kebanyakan yang saya liat pada waktu itu hanya suara-suara yang lebih tua yang lebih banyak di dengar bahkan suara kami sebagai Ketua RW kadang didengar tapi lebih banyak yang diabaikan”. (wawancara dilakukan pada 27 februari 2021).

Kurangnya keterlibatan Ketua RW di Desa Kota Bangun dalam mengikuti musrembang untuk merumuskan rencana program-program pembangunan di desa

semakin diperjelas oleh narasumber lainnya, seperti apa yang diungkapkan oleh salah satu Ketua RW yang lain yakni Tajana mengungkapkan bahwa:

“Partisipasi kami kurang dalam pelaksanaan Musrembang (Musyawarah Rencana Pembangunan) karena tidak ada sosialisasi, kerja sama kami Ketua RW se Desa Kota Bangun masih kurang bersatu karena tidak ada wadah atau tempat bagi komunitas kami di Desa Kota Bangun dan minimnya pembangunan desa yang diperuntukkan bagi masyarakat”. (wawancara dilakukan pada 26 februari 2021).

Dari berbagai pernyataan yang diberikan oleh beberapa narasumber dari kalangan pimpinan RW yang ada di Desa Kota Bangun, terlihat bahwa masih minimnya aspirasi yang tersalurkan dari kalangan pimpinan RW dan jika disalurkan sekalipun maka juga jarang dapat terealisasi dengan baik dan tepat sasaran. Pelaksanaan rapat musrembang yang dilakukan di Desa Kota Bangun terutama dalam memberikan usulan atau masukan mengenai program-program apa yang seharusnya dilakukan hanya berpusat pada keinginan dari Kepala Desa dan perangkatnya.

Dari berbagai pernyataan narasumber di atas, kita dapat melihat bahwa di Desa Kota Bangun memang selalu dilakukan pelaksanaan rapat musrembang yang dimana beberapa masyarakat ikut hadir dan berpartisipasi dalam memberikan usulan dan pendapatnya mengenai program-program apa yang akan dilakukan dalam membangun desa. Namun dalam pelaksanaan musrembang di Desa Kota Bangun, partisipasi masyarakat belum optimal dan belum menyeluruh serta masih perlu ditingkatkan karena masih banyak masyarakat yang belum berpartisipasi dan terlibat

langsung dalam proses pembuatan perencanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan di setiap tahunnya.

Tabel 4.12 Kategorinisasi Hasil Wawancara tentang Musrenbang

No	Kategorinisasi	Keterangan
1	Ide	Dari hasil wawancara terlihat bahwa sebenarnya sangat banyak ide yang dapat disalurkan jika partisipasi masyarakat tinggi dalam pelaksanaan musrenbang di Desa Kota Bangun. Namun pada kenyataannya pembangunan dengan ide yang disampaikan masyarakat belum sinkron adanya. Di satu sisi masyarakat banyak menyampaikan ide tapi tidak dianggap bila berpartisipasi dalam proses musrenbangdes.
2	Waktu	Kendala yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang adalah karena waktu dari peserta musrenbang tidak semuanya memungkinkan untuk hadir mengikuti proses musrenbang. Di lapangan dapat terlihat bahwa hanya sekitar 50% peserta musrenbang yang dapat hadir jika dibandingkan dengan undangan yang di sebar oleh perangkat desa untuk dapat menghadiri proses musyawarah pembangunan di Desa Kota Bangun.
3	Dampak	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang akan berdampak pada pembangunan yang akan dilaksanakan pada suatu desa tersebut. Sebab dengan partisipasi yang tinggi akan menjadikan pembangunan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sumber: Olahan Penulis, 2021

Pelaksanaan musrenbang desa dapat dilihat dari sudut pandang partisipasi, seperti bentuk partisipasi masyarakat dalam mengikuti musrenbang desa yang dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dijelaskan berupa deskripsi pelaksanaan kegiatan musrenbang di Desa Kota Bangun pada tahun 2016-2020, Bentuk partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa yang diadakan pada umumnya dapat dilihat dari tahapan musrenbang desa. Berikut adalah partisipasi masyarakat pada tahapan pelaksanaan musrenbang di Desa Kota Bangun mulai dari pra, pelaksanaan, serta pasca musrenbang.

1) Tahap Pra-Musrenbang Desa

Tahap pra-musrenbang merupakan tahap awal persiapan yang dilakukan

sebelum musrenbang desa dilaksanakan. Pada tahap ini terdiri dari tiga kegiatan yaitu: pengorganisasian musrenbang, pengkajian desa secara partisipatif dan penyusunan draf rancangan awal RKP Desa.

Pada pengorganisasian musrenbang terdiri dari kegiatan- kegiatan berupa pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang dan Tim Pemandu Musrenbang yang dilakukan oleh Kepala Desa, dan Persiapan teknis seperti penyusunan jadwal dan agenda, pengumuman kegiatan dan mengkoordinir persiapan logistik seperti tempat, konsumsi, alat dan bahan yang akan digunakan saat musyawarah yang dilakukan oleh perangkat desa, seperti yang diuraikan oleh Elfian Manurung selaku Sekretaris Desa Kota Bangun, beliau mengatakan bahwa :

“Tim Penyelenggara Musrenbang langsung dipilih oleh Kepala Desa, karena anggotakan Kepala Desa, LPMD dan BPD serta Sekretaris Desa, dan untuk kegiatan terkait persiapan teknis dilakukan oleh perangkat desa dan Tim Penyelenggara Musrenbang” (Hasil wawancara pada tanggal 15 Februari 2021).

Pada pengkajian desa secara partisipatif yang terdiri dari kegiatan kajian kondisi dan penyusunan data atau informasi desa. Kedua kegiatan ini ada dalam kegiatan yang disebut dengan musyawarah dusun dimana dilakukan musyawarah terkait permasalahan dan potensi desa perdusun bersama masyarakat baik dilakukan disetiap dusun, seperti yang diuraikan oleh Elfian Manurung selaku Sekretaris Desa Kota Bangun, beliau mengatakan bahwa:

“Sebelum dilakukan musrenbang desa, kegiatan desa yang terlebih dahulu dilakukan ialah musdus atau juga bisa disebut musdes. Musdus ini melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan untuk menyampaikan usulan-usulan terkait permasalahan pada tiap-tiap dusun” (Hasil wawancara pada tanggal 15 Februari 2021).

Untuk mendukung pernyataan tersebut berikut ini adalah daftar hadir peserta musdus, yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.13 Jumlah Kehadiran Peserta Musrenbang Desa Kota Bangun

Peserta	2016	2017	2018	2019	2020
Ketua RT	9	12	10	11	14
Kepala Dusun	2	2	1	3	5
Ketua RW	1	1	1	2	4
Perangkat Desa	4	5	5	6	6
Tokoh Masyarakat	2	2	3	2	4
Karang Taruna	1	1	1	1	1
LPMD	3	4	5	4	5
BPD	3	3	4	2	4
Kelompok Tani	2	2	2	2	2
Lain-lain	2	1	2	1	4
Total Jumlah Peserta	29	33	34	34	49

Sumber: Data Olahan Penulis, 2021

**Tabel 4.14 Rekapitulasi Usulan Rencana Pembangunan Desa
Kota Bangun pada Tahun 2016-2020**

Pengusul	2016	2017	2018	2019	2020
RT 01	4	2	3	2	3
RT 02	3	1	1	3	3
RT 03	2	4	3	2	3
RT 04	1	5	4	5	3
RT 05	2	1	1	1	3
RT 06	3	2	2	2	2
RT 07	4	3	1	2	2
RT 08	2	2	1	1	2
RT 09	1	1	3	2	2
RT 10	2	3	2	2	3
RT 11	1	2	2	3	2
RT 12	2	4	2	3	4
RT 13	1	5	3	4	3
RT 14	3	2	3	4	2
RT 15	4	1	3	2	3
RT 16	2	3	3	3	3
RT 17	1	3	2	4	3
RT 18	2	2	2	2	2
RT 19	2	1	1	2	4
RT 20	1	2	1	2	3
RT 21	2	3	2	2	2
Total Jumlah Usulan	45	52	45	53	57

Sumber : Data Olahan Penulis

Setelah pengorganisasian dan pengkajian desa secara partisipatif atau musyawarah dusun, maka selanjutnya adalah penyusunan draf rancangan awal RKP Desa yang dilakukan oleh Tim Pemandu Musrenbang dan Tim Penyelenggara Musrenbang. Kegiatan-kegiatannya berupa me-review dokumen RPJM Desa, kajian dokumen/data/informasi kebijakan program dan anggaran, dan penyusunan draf rancangan awal RKP Desa, seperti yang diuraikan oleh Elfian Manurung selaku Sekretaris Desa Kota Bangun, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk penyusunan draf rancangan awal RKP Desa dilakukan oleh Tim Penyelenggara Musrenbang dan Tim Pemandu Desa, karena proses ini berupa me-revei RPJM dan terkait anggaran pemerintah desa”. (Hasil wawancara pada tanggal 15 Februari 2021).

Pada tahap pra- musrenbang desa, masyarakat ikut serta dalam kegiatan sebelum musrenbang desa dilaksanakan, yaitu pada kegiatan pengkajian desa secara partisipatif atau yang biasa disebut dengan kegiatan berupa musdus ataupun musdes.

Penyusunan daftar prioritas dan penyusunan RKP Desa dan APBDes, seperti yang diungkapkan oleh Elfian Manurung selaku Sekretaris Desa Kota Bangun, beliau mengatakan bahwa:

“Setelah musrenbang desa selesai dilaksanakan, maka pemerintah desa akan melakukan rapat kerja oleh Tim Penyelenggara Musrenbang terkait SK tim delegasi, Penyusunan RKP Desa dan APBDes. Tim Delegasi Desa yang telah dipilih akan diberikan draf usulan-usulan dari hasil musrenbang tersebut” (Hasil wawancara pada tanggal 15 Februari 2021).

Penyusunan daftar prioritas tersebut ialah berupa daftar usulan yang akan diajukan ke musrenbang tingkat kecamatan. Dari tabel dibawah ini dapat dilihat daftar usulan musrenbang desa yang diajukan ke musrenbang kecamatan dari tahun

2017 sampai tahun 2019, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.15 Daftar Usulan Kegiatan Musrenbang Desa Kota Bangun
Pada Tahun 2016-2020**

No	Bidang Usulan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pembangunan Infrastruktur	10	10	12	15	15
2	Ekonomi	2	3	3	4	5
3	Sosial Budaya	2	2	4	2	2
Total Jumlah Usulan		14	15	19	21	22

Sumber: Data Olahan Penulis, 2021

Dari tabel tersebut dapat dilihat berapa jumlah yang dipilah dari usulan yang berasal dari musdus dan kemudian menjadi hasil usulan yang merupakan prioritas desa untuk diajukan ke dalam musrenbang tingkat kecamatan. Berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh dapat diketahui bahwa pada tahap akhir musrenbang desa ini merupakan tahap penyelesaian terkait penyusunan-penyusunan daftar prioritas, RKP Desa, APBDes dan penerbitan SK Kepala Desa terkait Tim Delegasi Desa dimana semuanya dilakukan oleh Pemerintah Desa sebagai Tim Penyelenggara Musrenbang Desa.

2) Tahap Pelaksanaan Musrenbang Desa

Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan musyawarah perencanaan desa dimana musrenbang desa merupakan sebuah forum musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan berbagai pihak yang terkena dampak hasil musyawarah. Pada tahap ini berbagai kelompok masyarakat diundang untuk memusyawarahkan bersama atas usulan-usulan yang didapatkan dari musyawarah dusun. Tahap ini terdiri dari beberap kegiatan seperti pemaparan dan diskusi panel sebagai masukan untuk musyawarah, pemaparan draf rancangan awal RKP Desa, kesepakatan

kegiatan prioritas dan anggaran, pembentukan tim delegasi, sidang komisi dan sidang pleno, selanjutnya penutupan dengan penandatanganan berita acara musrenbang desa.

Berbagai kelompok masyarakat tentunya dilibatkan dalam musyawarah ini, seperti yang diungkapkan oleh Elfian Manurung selaku Sekretaris Desa Kota Bangun, beliau mengatakan bahwa:

“Setelah kegiatan musdus telah selesai dan draf rancangan awal RKP desa telah disusun, maka diadakan musrenbang desa. Musdus dilaksanakan pada akhir tahun kemarin dan musrenbang desa sendiri diadakan pada awal tahun ini”. (Hasil wawancara pada tanggal 15 Februari 2021).

Pada pelaksanaan musrenbang di Desa Kota Bangun tahun 2017-2019 terdapat begitu banyak pihak yang hadir, namun jumlahnya tidaklah menentu pada setiap tahunnya. Terdapat beberapa aktor yang terlibat dalam musrenbang desa dari tahun ke tahun. Mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Dusun, LPMD, BPD, Kader Kesehatan, Kader Pendidikan, Kader PKK atau perwakilan perempuan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda atau karang taruna, perangkat desa dan kelompok lainnya yang terdiri dari kelompok-kelompok marginal seperti tukang bangunan, pengurus PNPM, perwakilan kecamatan (KAUR EKBANG) dan kelompok tani.

Dilihat dari jumlah total kehadiran masyarakat yang hadir mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan dari jumlah 38 peserta hingga mencapai jumlah 86 peserta pada tahun 2019. Peningkatan jumlah peserta musrenbang ini merupakan suatu hal yang sangat penting bagi perkembangan pelaksanaan musrenbang di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten

Kampar. Banyak peserta yang mengikuti musrenbang membuat usulan-usulan yang diajukan akan semakin beragam karena berasal dari berbagai kelompok masyarakat yang mengikuti musrenbang desa.

Dalam musrenbang desa, peserta musrenbang desa berdiskusi dengan pemerintah terkait penentuan prioritas desa untuk draf usulan-usulan yang akan diajukan pada tingkat musrenbang selanjutnya, seperti yang dikatakan oleh Sayugi selaku Kepala Desa Kota Bangun, beliau mengatakan bahwa:

“Dari usulan-usulan yang sudah didapatkan di musdus, akan didiskusikan lagi dalam musrenbang desa, masyarakat yang hadir akan menyampaikan usulan yang belum disampaikan jika ada, jika tidak maka langsung untuk diskusi terkait prioritas desa untuk draf usulan yang akan diajukan, setelah itu dalam musrenbang desa membahas terkait pemilihan usulan yang didapat di musdus, dan masyarakat menyampaikan berbagai pendapat akan hal itu.” (Hasil wawancara pada tanggal 10 Februari 2021).

Kegiatan pemilihan usulan-usulan yang didapatkan berada pada tahap sidang komisi dan sidang pleno dimana dalam sidang komisi dibahas terkait pembahasan dan penetapan prioritas kegiatan pembangunan yang akan datang dan pemisahan kegiatan berdasarkan kegiatan yang akan diselesaikan sendiri ditingkat desa dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab SKPD, seperti yang diungkapkan oleh Elfian Manurung selaku Sekretaris Desa Kota Bangun, beliau mengatakan bahwa:

“Pada tahap sidang komisi ini, akan dipilah-pilah mana yang akan diajukan sebagai usulan pada musrenbang tingkat kecamatan karena hal tersebut merupakan tanggung jawab dinas (SKPD) dan mana yang akan diselesaikan sendiri oleh desa, seperti pengajuan pavingisasi balai desa yang sempat diajukan dua kali pada musrenbang, namun diputuskan untuk dibangun sendiri oleh pemerintah desa dengan APBDes”. (Hasil wawancara pada tanggal 15 Februari 2021).

Setelah semua kegiatan selesai, maka sampai pada penutupan musrenbang

desa yang merupakan penandatanganan berita acara musrenbang desa. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa tahap demi tahap yang dilakukan masuk pada pelaksanaan musrenbang desa dari pembukaan hingga penutupan dan masyarakat mengikuti semua tahap tersebut.

3) Tahap Pasca Musrenbang Desa

Tahapan pra musrenbang Desa Kota Bangun dilaksanakan beberapa hari sebelum pelaksanaan Musrenbang Desa, yang juga bertujuan untuk pembentukan Tim Penyelenggara Musrebang (TPM), pembentukan Tim Pemandu oleh TPM, menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan Musrenbang Desa, menentukan peserta yang diundang dalam kegiatan Musrenbang, mengkaji kondisi dan permasalahan desa, serta menyusun draf awal RKP Desa untuk menentukan rancangan awal rencana kerja pembangunan desa agar dapat memberikan masukan atau penjelasan kepada masyarakat, pembangunan yang sangat dibutuhkan untuk kebutuhan bersama demi kemajuan desa.

Beberapa kegiatan penting yang harus dilakukan setelah Musrenbang Desa adalah sebagai berikut : 1. Tim Penyusun RKP Desa melakukan finalisasi dokumen RKP Desa berdasarkan masukan dan penyempurnaan yang telah ditetapkan dalam Musrenbang Desa. Selanjutnya Dokumen RKP Desa tersebut disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Keputusan Kepala Desa. 2. Tim Penyusun RKP Desa selanjutnya menyiapkan Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKP Desa) dan mendorong kepala desa untuk menyampaikannya kepada camat sebelum pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

3. Faktor Penghambat Komunikasi Partisipatif Pada Musrenbang Desa Kota Bangun

Berdasarkan hasil penelitian tentang komunikasi partisipatif pada musrenbang desa di Desa Kota Bangun, keterlibatan masyarakat dalam forum musrenbang masih terbilang rendah dan belum maksimal adanya. Hal ini tentu disebabkan oleh beberapa faktor atau kendala yang dihadapi oleh pemerintah Desa Kota Bangun. Komunikasi yang dibangun pemerintah desa belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan yakni agar masyarakat terlibat aktif atau berpartisipasi pada setiap forum musrenbang desa dari tahun ke tahun.

Setelah dilakukan penelitian terkait komunikasi partisipatif pada musrenbangdes di Desa Kota Bangun. Selanjutnya, ada beberapa hal yang dapat menjadi faktor penghambat bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif menggunakan komunikasi yang partisipatif dalam pelaksanaan musrenbang desa yang dilaksanakan, sebagai berikut:

1) Perspektif Eksternal

Dilihat dari perspektif eksternal, faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan musrenbang desa di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir adalah profesi atau pekerjaan. Profesi yang dijalani oleh masyarakat ataupun semua peserta musrenbang desa sangatlah berbeda-beda, selain peserta musrenbang bekerja pada sector pemerintahan desa, sebagiannya lagi juga berprofesi sebagai petani dan lain-lain. Seperti yang dikatakan oleh Sayugi yang merupakan Kepala Desa Kota Bangun, beliau mengatakan bahwa:

“Salah satu hal yang menjadi penghambat dari partisipasi masyarakat yang telah diundang untuk mengikuti musrenbang desa adalah faktor pekerjaan yang menyebabkan beberapa peserta berhalangan untuk hadir dalam musrenbang, mengingat peserta yang telah diundang merupakan masyarakat dari berbagai profesi. Sehingga waktu atau jam kerja dari beberapa peserta dapat berbeda-beda”. (Hasil wawancara pada tanggal 10 Februari 2021).

Selain itu, dikemukakan juga oleh Elfian Manurung selaku Sekretaris Desa Kota Bangun yang mengatakan bahwa:

“Beberapa peserta musrenbang desa banyak yang berhalangan hadir untuk mengikuti musrenbang dalam beberapa tahun lalu. Hal itu bisa disebabkan oleh pekerjaan dan waktu pelaksanaan musrenbang yang tidak tepat dengan profesi yang dijalani oleh peserta musrenbang. Untuk itu, pemerintah nerubah waktu pelaksanaan musrenbang di Desa Kota Bangun yang sebelumnya dilaksanakan pada sore hari, sekarang dilaksanakan pada waktu malam hari setelah waktu sholat Isya’. Dengan begitu beberapa peserta dapat menghadiri musrenbang desa karena kebanyakan peserta telah menyelesaikan pekerjaan masing-masing”. (Hasil wawancara pada tanggal 15 Februari 2021)”.

Salah satu faktor lagi yang menjadi penghambat masyarakat dalam mengikuti musrenbang adalah cuaca, seperti yang disebutkan oleh Sayugi selaku Kepala Desa Kota Bangun, beliau mengatakan bahwa:

“Faktor lain yang menjadi salah satu penghambat ialah cuaca, seperti saat sedang hujan itu akan menghambat seseorang dalam menghadiri suatu kegiatan desa walaupun, dan hal tersebut tergantung pada kemauan atau besarnya motivasi tiap-tiap individu yang menjadi peserta dalam musrenbang desa”. (Hasil wawancara pada tanggal 10 Februari 2021).

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa yang menjadi faktor penghambat dilihat dari perspektif eksternal ialah pekerjaan, waktu pelaksanaan musrenbang dan cuaca. Namun yang menjadi faktor penghambat terbesar ialah pekerjaan dari masing-masing peserta.

2) Perspektif Internal

Faktor penghambat dari perspektif internal ialah kemauan atau motivasi dari setiap inividu yang berbeda-beda. Beberapa masyarakat terkadang menunjukkan kepedulian terhadap kegiatan pemerintah namun beberapa menunjukkan sifat kurang peduli terhadap program maupun kegiatan pemerintah seperti yang dikemukakan oleh Tugino selaku salah seorang warga RW 2 RT 13, beliau mengatakan bahwa:

“Mengikuti kegiatan musrenbang itu suatu hal tidaklah sulit, namun beberapa orang mempunyai kemauan atau motivasi yang berbeda-beda dalam memandang kegiatan pemerintah, meskipun kegiatan musrenbang ini merupakan kegiatan yang sangat berguna bagi perkembangan pembangunan dilingkungan masyarakat itu sendiri”. (Hasil wawancara pada tanggal 2 April 2021).

Berdasarkan penuturan dari salah seorang masyarakat Desa Kota Bangun yang menilai soal faktor penghambat suksesnya pelaksanaan kegiatan musrenbang di Desa Kota Bangun adalah karena perbedaan cara pandang masyarakat terhadap semua program yang dilaksanakan oleh pemerintah, padahal jika diikuti dengan sungguh-sungguh pastilah akan memberi manfaat bagi masyarakat banyak.

Kemudian terdapat kendala dari pemerintah desa dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan musrenbang di Desa Kota Bangun. Kendala dari sisi pemerintah desa adalah sebagai berikut:

- a) Lemahnya komitmen penguasa politik yang dalam hal ini adalah kepala desa serta dukungan sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam melaksanakan sosialisasi program musrenbang desa dan penyebaran informasi tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa.

- b) Lemahnya dukungan anggaran desa yang tersedia serta rendahnya kemampuan lembaga legislatif dalam hal ini adalah BPD dalam mengakomodir konstituennya.
 - c) Tidak ada pemberitahuan secara rinci mengenai bagaimana proses Musrenbang, apa yang akan dibahas dalam Musrenbang, untuk kepentingan apa dan sebagainya.
 - d) Tidak adanya riset atau penelitian awal terhadap kebutuhan masyarakat.
 - e) Dalam kegiatan Musrenbang ini masih terdapat tidak terakomodirnya kehadiran stakeholders penting dalam Musrenbang seperti Kader Pembangunan Desa, Tokoh Masyarakat, Organisasi Wanita.
- Sedangkan dari sisi masyarakat kendalanya adalah:
- a) Kurangnya pemahaman masyarakat peserta musrenbang terhadap perencanaan pembangunan.
 - b) Adanya sikap pesimis terhadap proses perencanaan pembangunan karena usulan-usulan mereka tidak terakomodasi serta kesibukan masyarakat dalam mencari nafkah sehingga tidak memiliki waktu untuk ikut terlibat dalam proses perencanaan pembangunan.
 - c) Keterbatasan informasi dan sosialisasi tentang program musrenbang desa yang diterima oleh masyarakat serta minimnya kegiatan non fisik yang diusulkan dalam Musrenbang, sehingga proses pemberdayaan masyarakat menjadi terhambat serta lambatnya tindak lanjut nyata dari hasil Musrenbang, sehingga program/kegiatan yang diusulkan setiap tahun hampir sama.

d) Waktu penyelenggaraan sangat pendek, sehingga sulit untuk mendorong timbulnya partisipasi masyarakat yang aktif. Sempitnya waktu inilah yang menjadi kendala dalam penyerapan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang.

Rendahnya keterlibatan masyarakat merupakan salah satu indikator kurang berhasilnya komunikasi partisipatif pada musrenbang di Desa Kota Bangun. Kurangnya pertemuan antara masyarakat dengan pemerintah membuat proses perencanaan pembangunan tidak efektif dan hanya akan menjadi dokumen semu belaka.

Masyarakat memang dilibatkan dalam proses penyusunan proses kegiatan, dan memberikan usulan yang dibatasi. Tetapi hanya sebatas sampai disitu. Pengambilan keputusan tetap ditangan pemerintah. Selain itu kurangnya pengawasan dan control dari masyarakat untuk mengawal proses kegiatan tersebut. Dan yang kedua peran masyarakat sebagai *social control* masih terbatas, kurangnya informasi yang didapat masyarakat.

C. Pembahasan Penelitian

Proses Musrenbang yang menganut pendekatan *bottom-up* harus melibatkan partisipasi masyarakat dari semua golongan, laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, Musrenbang akan menghasilkan rancangan pembangunan yang sesuai kehendak dan kebutuhan masyarakat, terutama perempuan. Selama ini, pelaksanaan Musrenbang di tingkat pusat maupun daerah, belum mengakomodir dan memperhatikan kebutuhan perempuan. Keterlibatan perempuan dalam Musrenbang desa kota bangun hanya formalitas tanpa pernah diberi kesempatan bersuara atau didengar suaranya walaupun sering diadakan pertemuan.

Deskripsi keterlibatan masyarakat pada pengambilan kebijakan pemerintah daerah dalam musrenbang desa kota bangun kecamatan tapung hilir. Berdasarkan Hasil wawancara peneliti dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat pada pengambilan kebijakan pemerintah daerah dalam musrenbang Desa Kota Bangun dapat dikatakan belum optimal adanya, walaupun kepala desa serta tokoh masyarakat perempuan sudah mulai dilibatkan. Hal ini dikarenakan keterlibatan mereka masih kurang dalam setiap kebijakan pemerintah daerah yang akan diambil.

Masyarakat juga sudah mulai dilibatkan dalam proses penyusunan proses kegiatan, dan memberikan usulan. Tetapi hanya sebatas sampai disitu saja, dalam proses pengambilan keputusan tetap ditangan pemerintah. Selain itu masih kurangnya pengawasan dan control dari masyarakat untuk mengawal proses kegiatan tersebut. Peran masyarakat sebagai *social control* yang masih terbatas, kurangnya

informasi yang didapat masyarakat karena yang hadir pada setiap kegiatan musrenbang hanya orang-orang itu saja, seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Ada beberapa hal yang jadi keluhan masyarakat tentang pola musrenbang, seperti desa tidak memiliki kuasa untuk menentukan program mana yang ingin dikerjakan nantinya, dan banyaknya usulan sekadar memenuhi list program yang diajukan, tanpa ada jaminan berapa jumlah program yang terakomodasi.

Data menunjukkan, dari semua usulan masyarakat setiap tahunnya, program yang terserap dalam perencanaan dan penganggaran hanya sepersekian persen. Padahal, masyarakat yang awalnya antusias ikut dalam proses musrenbang menyangka sebagian besar programnya akan direalisasikan. Kekecewaan ini berimplikasi pada menurunnya minat masyarakat bertanya atau berbicara dalam proses musyawarah rencana pembangunan tahun berikutnya. Lebih parah lagi keaktifan masyarakat pada kegiatan pembangunan lainnya semakin menurun.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah rencana pembangunan Desa Kota Bangun Masyarakat desa kota bangun menunjukkan partisipasi yang sudah cukup baik dalam musrenbang ini, untuk itu pemerintah sudah dapat melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar dalam musrenbang tahun ini.

Media komunikasi yang digunakan pada musrenbang Desa Kota Bangun diantaranya adalah melalui media cetak seperti surat kabar, media audio seperti radio yang menyiarkan adanya kegiatan musrenbang baik di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan, kemudian analisis dan riset diperlukan dalam rangka mencapai

komunikatif partisipatif yang ditempuh untuk mencapai tujuan mengetahui sampai dimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan.

Setelah itu dianalisislah kegiatan riset dengan menyusun daftar kebutuhan masyarakat. Daftar kebutuhan ini kemudian dibedakan antara daftar kebutuhan yang sifatnya mendesak, agak mendesak, dan tidak terlalu mendesak. Hal ini penting dilakukan agar segera diketahui mana saja program yang nantinya dilaksanakan secepatnya, atau mana yang masih bisa menunggu, sehingga pemerintah bisa mengatur prioritas dalam pembangunan daerah.

Dengan demikian, dengan membawa daftar masalah dan kebutuhan masyarakat, keberadaan musrenbang akan dapat lebih efektif, dan sesuai dengan harapan masyarakat. Kegiatan komunikasi di perlukan untuk menjembatani proses mediasi antara kepentingan masyarakat dengan pemerintah dalam untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi yang terjadi di forum musyawarah rencana pembangunan tidak berlangsung baik apabila tidak melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, unsure public/masyarakat dengan asumsi bahwa masyarakatlah yang sangat paham dengan kondisi yang terjadi di wilayahnya.

Umpan balik (*feedback*) yang ditimbulkan dalam proses komunikasi memberikan gambaran kepada komunikator tentang seberapa berhasil komunikasi yang dilakukannya. Jadi, umpan balik (*feedback*) merupakan satu-satunya elemen yang dapat '*menjudge*' apakah komunikasi yang telah berlangsung berhasil atau gagal. Keberlangsungan komunikasi yang dibangun sebelumnya ditentukan oleh umpan balik sebagai bentuk penilaian.

Dengan mengetahui umpan balik yang dikirimkan oleh komunikan, maka sebagai komunikator, kita akan dapat langsung mengetahui apakah tujuan dari pesan kita tersampaikan atau tidak. Apakah umpan balik itu berupa respon negatif ataupun respon positif. Umpan balik yang didapatkan pada kegiatan musrenbang desa kota bangun sudah dapat respon positif dari masyarakat dan legislatif maupun eksekutif.

Hal ini terlihat dari keaktifan masyarakat mengikuti pertemuan yang diadakan oleh tingkat kelurahan, maupun pada tingkat kecamatan. Suara mereka sudah mulai didengarkan, mereka menjadi lebih mudah menyampaikan aspirasi kepada legislatif maupun eksekutif melalui tokoh masyarakat yang ada di daerah mereka khususnya desa kota bangun.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa fungsi *feedback* adalah sebagai mekanisme kendali untuk mengetahui apakah perilaku komunikasi seorang komunikator telah efektif untuk mencapai sasarannya. Seperti halnya pada musrenbang desa kota bangun, perilaku masyarakat pada wilayah tersebut menunjukkan sikap yang lebih terbuka dan sebagian lagi masih menanggapi dengan sikap yang kurang terbuka.

Masyarakat yang menerima atau yang bersikap lebih terbuka sebagian dari mereka sudah mulai mengerti tentang musrenbang yang dilaksanakan di daerah mereka, khususnya bagi warga desa kota bangun yang menyadari pentingnya pembangunan akses jalan dan sarana prasarana yang menunjang perekonomian masyarakat desa kota bangun yang nantinya akan mendukung sektor pertanian dan perkebunan.

Dalam proses penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di desa kota bangun, banyak sekali terdapat fenomena- fenomena menarik yang terjadi, terutama berkaitan dengan langkah pelibatan masyarakat dan *stakeholders* guna menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

Partisipasi warga diwujudkan dalam bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses Musrenbang. Dimana dalam Musrenbang tersebut memiliki dasar yang jelas dalam penyelenggaraannya, memiliki tujuan sosial, dan ada keterlibatan warga sebagai *stakeholders* dalam proses pembangunan yang dilaksanakan. Kegiatan itu mempunyai kerangka perencanaan bersama untuk menetapkan tujuan, kegiatan, pelaksanaan, dan penerima manfaat, serta metode pemantauan dan evaluasi program. Aktivitas itu pun selalu mengedepankan atau berasal dari aspirasi warga. Dengan demikian, ada ruang yang dibuka untuk berpartisipasi. Warga harus didorong untuk menciptakan aktivitas, karena itu rakyat harus terorganisir.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan pembangunan yang menggunakan komunikasi partisipatif di Desa Kota Bangun belum melibatkan masyarakat secara keseluruhan dan dalam proses perencanaan pembangunan belum memberikan peluang yang sama kepada masyarakat dalam memberikan sumbangan pemikiran serta masih terkendala waktu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan musrenbang di Desa Kota Bangun telah dilaksanakan dengan mengikuti tahapan pra musrenbang, pelaksanaan musrenbang, sampai pada pasca musrenbang. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang tersebut memang belum optimal dan belum menyeluruh serta masih perlu ditingkatkan karena masih banyak masyarakat yang belum berpartisipasi dan terlibat langsung dalam proses pembuatan perencanaan program pembangunan yang ada pada setiap tahunnya.
2. Kendala dalam membangun komunikasi partisipatif kepada seluruh warga masyarakat desa seperti: Lemahnya komitmen penguasa politik desa yakni kepala desa dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan keinginan dari masyarakat itu sendiri. Lemahnya dukungan sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam melaksanakan sosialisasi program musrenbang desa dan penyebaran informasi akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa. Lemahnya dukungan anggaran desa yang tersedia. Rendahnya kemampuan lembaga legislatif dalam hal ini adalah BPD dalam mengakomodir konstituennya. Tidak ada pemberitahuan secara rinci mengenai bagaimana proses Musrenbang, apa yang akan dibahas dalam Musrenbang, untuk kepentingan apa dan sebagainya.

B. Saran

1. Dalam tingkat Desa perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat ke depan seharusnya semua *stakeholder* pembangunan Desa Kota Bangun, dilibatkan dalam proses Musrenbang dalam komposisi yang lebih utuh dan juga terlibat dari proses awal. Tidak hanya terlibat pada saat musrenbang saja. Artinya, Pemerintah Desa Kota Bangun harus memikirkan model alternatif selain musrenbang dalam menjaring aspirasi masyarakat secara lebih mendalam.
2. Perlunya *Civil education* kepada masyarakat Desa Kota Bangun, agar masyarakat mengetahui hak-haknya dalam pembangunan. Oleh karena itu, dibutuhkan partisipasi masyarakat Desa Kota Bangun untuk dapat mengikuti proses perencanaan pembangunan di Desa Kota Bangun. Sehingga dalam penyelenggaraan Musrenbang Kedepannya dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abu, Huraerah. 2008. *Perencanaan dan Pembangunan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora.
- Alwasilah, Chaedar A. (2002). *Pokok Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Alfitri. 2011. *Community Development (Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Cetakan ke-1.
- Amien, A.Mappadjantji. 2003. *Kemandirian Lokal, Perspektif Sains Baru Terhadap Organisasi, Pembangunan dan Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Cangara, Hafied. 2014. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Hadianto. 2008. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Jim Iffe. 2015. *Community Development (Alternatif Pembangunan Masyarakat di Era Glonalisasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Cetakan ke-2.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. 2014. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rianingsih, Djohani. 2008. *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa*. Bandung: FPPM.
- Sahroni, dkk. 2000. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: GTZ-Usaid.
- Sugiyah. 2001. *Partisipasi Pembangunan*. Jakarta: ISMEE
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Totok, dkk. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Tufte, Thomas; Mefalopulos, Paolo. 2009. *Participatory Communication : A Practical Guide*. World Bank Working Paper ; no. 170. World Bank.

Wisnu, Indrajit. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan*. Malang: Intrac Publishing.

Zulkarimen Nasution. 2002. *Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

JURNAL:

Agung Ngurah Aritama, 2015. *Implikasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Terhadap Pembangunan Spasial Di Kelurahan Kesiman Denpasar*, (Skripsi Pascasarjana Universitas Udayana, 2015)

Bekti. 2017. *Musrenbang: Musyawarah Perencanaan Pembangunan*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303 – 341X Volume 3, Nomor 2, Mei-Agustus 2015.

Missa, Veronika. Suprojo, Agung. Adiwidjaja, Ignatius. 2013. *Peran Komunikasi Organisasi Pada Pemerintah Desa Landung Sari Dalam Menunjang Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat*. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik. Vol. 2 No. 1

Martini M, 2010. *Skripsi “Partisipasi Masyarakat Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kabupaten Bantaeng (Survey di Kecamatan Bantaeng)*

Moni Febrianti, dkk. 2020. *Komunikasi Partisipatif Dalam Pelaksanaan Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas di Nagari Solok Ambah Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung*. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Vol.4 No.3 P-ISSN; 2541-5255 E-ISSN: 2621-5306

Muchtar, K. 2016, *Komunikasi Politik dan Pembentukan Citra Partai*. Jurnal Ilmu Komunikasi. UIN Sunan Gunung Jati: Bandung

Satries, Wahyu Ishardino. 2011. *Mengukur Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Bekasi Dalam Penyusunan APBD Melalui Pelaksanaan Musrenbang 2010*. Jurnal Kybernan Vol. 2, No. 2. September 2011.

Satriani dan Muljono. 2012. *Komunikasi Partisipatif pada Program Pos Pemberdayaan Keluarga*. Jurnal Ilmiah. Fakultas Ekologi Manusia: Institut Pertanian Bogor

Sinaga, Winoto dan Perdana. 2016. *Membangun komunikasi partisipatif masyarakat*

upaya melestarikan tanaman salak lokal di Manonjaya Tasikmalaya. Jurnal Kajian Informasi dan Kepustakaan. Universitas Padjajaran.

Dokumen Lain:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Musrenbang Desa

